

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)

TAHUN 2022



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya Laporan layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Adapun laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Bab 1 adalah Pendahuluan, Bab 2 Referensi Hukum, Bab 3 membahas Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Bab 5 membahas Kesimpulan Dan Saran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP Dan Operasional PPID Tahun 2022 ini .

Medan, Januari 2023

**Tim Penyusun**

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab 1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3 Sasaran.....	1
1.4 Keluaran.....	2
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
1.6 Tenaga Pendukung.....	2
1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.....	3
1.8 Sistematika Pembahasan.....	3
<b>Bab 2 Referensi Hukum .....</b>	<b>4</b>
<b>Bab 3 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik...</b>	<b>5</b>
3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	5
3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik.....	12
3.3 Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya.....	12
3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2022.....	13
3.5 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2022.....	15
<b>Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....</b>	<b>16</b>
<b>Bab 5 Kesimpulan Dan Saran.....</b>	<b>16</b>

## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan cepat, informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan. Tanpa informasi, suatu perusahaan atau instansi tidak akan dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau instansi dengan baik. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan operasional yang baik dan teratur, maka diperlukan suatu sistem yang terkomputensasi dan terintergrasi agar dapat mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas. upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyebarkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan – badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Pada konteks inilah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan beserta hasil dan manfaatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.2 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar menunjang pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.3 Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya informasi yang akurat terkait dengan semua aktifitas dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

#### 1.4 Keluaran

Pada kegiatan ini, keluaran yang dihasilkan adalah disajikannya informasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk berita dan di tampilkan ke dalam web site yang telah tersedia sehingga bisa di akses oleh masyarakat dengan seluas-luasnya.

#### 1.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain :

- A. Melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- B. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data.
- C. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi.
- D. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- E. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

#### 1.6 Tenaga Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga pendukung. Tenaga pendukung yang dimaksud bertugas mengembangkan website, menginput seluruh bahan serta data terkait dengan seluruh pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, menyusun narasi berita dan menyusun laporan bulanan yang berisikan tentang penugasan yang telah dilaksanakan. Tenaga pendukung disyaratkan memiliki kualifikasi teknis sebagai berikut :

1. Tenaga Pendukung Pengembangan Website
  - a) Pendidikan Sarjana S-1 Teknologi Informatika/Teknologi Informasi/Sistem Informasi;
  - b) Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;
  - c) Mampu merekam, mengedit, dan mengembangkan website pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta menginput berita kegiatan Dinas pada website;
  - d) Menguasai manage servis server berikut software pendukungnya;
2. Tenaga Pendukung Penulis
  - a) Pendidikan Sarjana S-1 Komunikasi;
  - b) Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;
  - c) Mampu menyusun informasi sebagai bahan berita atas pelaksanaan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

Adapun jangka waktu pekerjaan tenaga pendukung yang dimaksud selama 10 (sepuluh) bulan.

**1.7 Jangka Waktu Pekerjaan**

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan.

**1.8 Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan pada kegiatan ini meliputi :

Bab 1 : Pada bab ini menguraikan antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, keluaran, ruang lingkup kegiatan, tenaga pendukung, jangka waktu pelaksanaan dan sistematika pembahasan.

Bab 2 : Bab ini berisikan referensi hukum yang terkait dala pelaksanaan kegiatan.

Bab 3 : Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Bab 4 : Pada bab ini membahas Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .

Bab 5 : Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan Dan Saran.

## Bab 2 Referensi Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

## Bab 3

### Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik, serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

#### 3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dalam rangka operasionalisasi PPID pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media, namun sebagai berikut :

##### A. Melalui website <http://dispkp.sumutprov.go.id>

#### Website Dan Aplikasi PPID





### Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi



### Laporan PPID



B. Melalui Media Sosial Instagram : disperkimsurut



### C. Melalui Media Sosial Facebook : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara



#### Postingan Facebook



### Postingan Facebook



### Postingan Facebook



#### D. Pelayanan Informasi

##### Mengisi Buku Tamu

Bagi setiap orang yang berkunjung ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu, harus mengisi Buku Tamu yang didalamnya berisikan tanggal kedatangan, nama, Instansi/Organisasi/Perseorangan, jabatan, alamat, keperluan dan tanda tangan. Pihak Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu berhak untuk tidak melayani pengunjung, jika memang dirasa tidak perlu untuk memberikan informasi.



Tempat Terima Tamu

Lobby Kantor sebagai tempat pelayanan informasi PPID

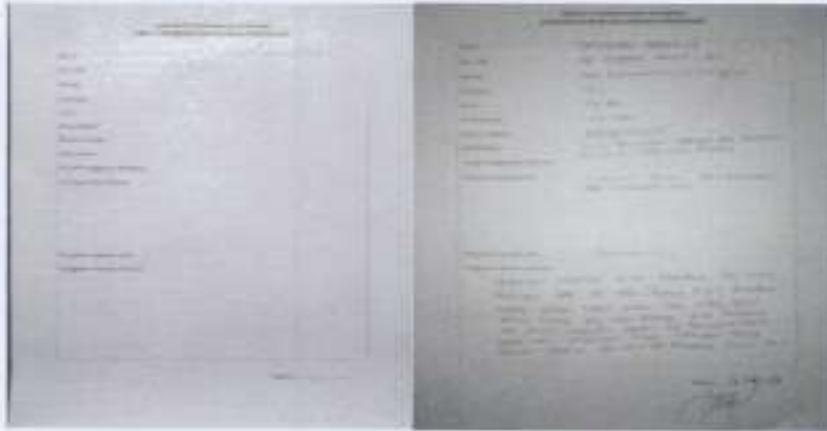


Untuk mencegah penyebaran Virus Covid – 19, tamu yang berkunjung lebih dari satu orang di terima dan berdiskusi di tempat yang disediakan di luar ruangan kantor (*outdoor*).



### Mengisi Form Permintaan Informasi

Sebelum memperoleh informasi lebih lanjut dan sebagai bahan data untuk dirangkum pada PPID, tamu yang berkunjung mengisi form yang telah disediakan yang memuat antara lain nama pengunjung, informasi yang diminta, yang melayani permintaan informasi dan tanggapan pemberi informasi.



### Kotak Saran

Pengunjung setelah memperoleh informasi, selanjutnya akan mengisi kuesioner terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu serta saran-saran untuk peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang yang kemudian dimasukkan ke Kotak Saran. Adapun kuesioner tersebut akan diinput ke aplikasi Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Adapun jumlah responden yang telah mengisi kuesioner dan telah diinput berjumlah sebanyak 107 responden. (Hasil penilaian terlampir)



### 3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Secara operasional PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf, yaitu :

1. Kepala Dinas selaku Atasan PPID
2. Sekretris Dinas selaku PPID Pembantu
3. Pih. Kasubbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik selaku Sekretaris PPID Pembantu.
4. Samsul Efendi, S.E. (Kepala Sub Bagian Keuagn) selaku Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi.
5. Dra. Beslida Sahmawati, M.Si (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) selaku Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi.
6. Risdianto, S.Sos (Penyusun Rencana Anggaran) selaku Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.
7. Petugas Informasi dan Pembuat Berita masing-masing seksi :
  - a. Nanda Rahmana, S.Kom
  - b. Agustiawan Setiadi
  - c. Andri Lesmana, St
  - d. Dameria Lubis
  - e. Nurwanto

### 3.3 Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya

Tahun Anggaran 2022, melalui APBD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tersedia anggaran pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan administasi umum perangkat daerah subkegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD dan dengan pagu anggaran sebesar 306.900.000 (Tiga Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Jasa Tenaga Pendukung sebesar Rp. 90.000.000,00, yang terdiri dari :
  - a. Belanja Jasa Tenaga Pendukung IT sebesar Rp. 54.000.000,00 sebanyak 1 (satu) orang selama 12 (duabelas) Bulan.
  - b. Belanja Jasa Tenaga Pendukung Penulis sebesar Rp. 36.000.000,00 sebanyak 1 (satu) orang selama 12 (duabelas) Bulan.

3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2022

No.	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Tujuan Penggunaan Informasi	Informasi Yang Diminta	Keputusan	Tanggal Jawaban
1	19 Januari 2022	Nurmatias	BPCB Aceh	Berjumpa Kadis	Berjumpa Kadis		
2	22 Januari 2022	Sutja Targani	SMKN 2 Medan	Antar Surat PKL	Antar Surat PKL		
3	22 Februari 2022	Dewi Pulungan	PT. Solusi Mantap Raja Teknologi	Undangan Sosialisasi Ekatalog	Undangan Sosialisasi Ekatalog		
4	08 Maret 2022	Popy Pradianti	BPPW Sumut	Audensi Koordinasi	Audensi Koordinasi		
5	12 Maret 2022	Abdu Kadir Batubara	Inspektorat Provsu	Surat	Surat		
6	15 Maret 2022	Yuni	Bank Dbs	Perkenalan Produk	Perkenalan Produk		
7	24 Maret 2022	R Manurung	SMKN 7 Medan	Kunjungi Siswa PKL	Kunjungi Siswa PKL		
8	30 Maret 2022	Achyar Tambusai	Wiraswasta	Bertemu Bapak Sekretaris	Bertemu Bapak Sekretaris		
9	6 April 2022	M. Iqbal Tanjung	PKP Labura	Bertemu Bapak Kadis	Bertemu Bapak Kadis		
10	13 April 2022	Dedy Sitohang	CV. Uli Latih	Bertemu dengan Bapak kadis	Bertemu dengan Bapak kadis		

*Laporan PPID 2022*

11	22 April 2022	Rivali	PUPR Kab. Labuhan Batu	Koordinasi Peta RP3KP Provsu	Koordinasi Peta RP3KP Provsu		
12	26 April 2022	Barita	IPK	Bertemu dengan Bapak Kadis	Bertemu dengan Bapak Kadis		
13	4 Mei 2022	Luslana	Dinas TPH	Rapat Menejemen Resiko	Rapat Menejemen Resiko		
14	11 Mei 2022	Haris Tarigan	DPRD. Siantar P	Konsultasi	Konsultasi		
15	24 Mei 2022	Utami	IDI	Undangan	Undangan		
16	03 Juni 2022	Irpan	BPKAD	Undangan	Undangan		
17	10 Juni 2022	Drs. Adu P. Sitorus	Dinas PKP Labura	Koordinasi tentang SK Kumuh dan PSU	Koordinasi tentang SK Kumuh dan PSU		
18	16 Juni 2022	Zulkarnain Hutasuhut	KORPRI	Konsultasi dengan Kadis	Konsultasi dengan Kadis		
19	07 Juli 2022	T. Hafiz Zuhaimi	Dinas SDA,CK,TR	Tanda Tangan DP3/SKP	Tanda Tangan DP3/SKP		
20	12 Juli 2022	Nadia Arief	CV. Batang Gadis	Koordinasi Ke Pak Ade	Koordinasi Ke Pak Ade		
21	02 Agustus 2022	Febry A.	DKSI	Bertemu Bapak Yusuf Bendahara	Bertemu Bapak Yusuf Bendahara		
22	10 Agustus 2022	Saidil	Kominfo Provsu	Undangan Validasi Data Statistik Selektoral	Undangan Validasi Data Statistik Selektoral		

*Laporan PPID 2022*

				Tahun 2022	Tahun 2022		
23	25 Agustus 2022	Hermanto Pasaribu, SH	DPRD Provsu	Surat Undangan Pers	Surat Undangan Pers		
24	07 September 2022	Achyar Tambusai	Wiraswasta	Silaturahmi	Silaturahmi		
25	13 September 2022	Ancha Batubara	BPBD Provsu	Mengantar Undangan untuk Pak Kadis	Mengantar Undangan untuk Pak Kadis		
26	21 September 2022	M. Yusuf NST	PUPR	Keperluan Dinas	Keperluan Dinas		
27	05 Oktober 2022	Indah Amalia	Instansi Kantor	Koordinasi	Koordinasi		
28	11 Oktober 2022	Nadia	CV. Batang Gadis	Koordinasi ke Pak Ade	Koordinasi ke Pak Ade		
29	09 November 2022	Hevickri	Dinas SDA, CKTR	Tanda Tangan SKP	Tanda Tangan SKP		
30	24 November 2022	Febry A	DKSI	Bertemu Bendahara Pak Yusuf	Bertemu Bendahara Pak Yusuf		
31	10 Desember 2022	Superman	Hotel Madani	Kunjungan	Kunjungan		
32	22 Desember 2022	T. Siti Khadijah	CV. Putra Sumatera	Bertemu Bu Pipit	Bertemu Bu Pipit		

**3.5 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2022**

Dalam rangka memberi informasi seluas-luasnya kepada publik, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menampilkan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk berita pada Website Dinas. Adapun untuk Tahun 2022, jumlah berita yang telah di tampilkan mulai Bulan Januari s/d Bulan Desember 2022 sebanyak 68 berita. Adapun berita tersebut terdiri dari kegiatan di lingkungan Kantor Dinas maupun kegiatan yang sifatnya di luar Kantor Dinas. (Kumpulan berita terlampir)

## **Bab 4**

### **Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Pada Tahun Anggaran 2022, pelayanan informasi belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan adanya Virus Covid-19 , sehingga pelayanan melalui tatap muka langsung sangat terbatas. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana pendukung juga menjadi sebab masih belum maksimalnya pelayanan informasi.

## **Bab 5**

### **Kesimpulan Dan Saran**

Adapun kesimpulan akhir dari kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID antara lain :

- Website sebagai wadah publikasi kegiatan Dinas PKP Provsu;
- Sarana prasarana merupakan instrumen penting dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Pelayanan informasi kepada masyarakat pada Tahun 2022 lebih meningkat

Sedangkan saran dapat di uraikan sebagai berikut :

- Perlu pengembangan website,
- Perlu peningkatan sarana prasarana pendukung;

January 20, 2022 11:15:00 AM

## Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata mewakili Kepala Dinas membuka acara Rapat Sosialisasi Sistem Informasi RTLH

Medan - Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata mewakili Kepala Dinas membuka acara Rapat Sosialisasi Sistem Informasi RTLH. Rapat Sosialisasi diadakan di Ruang Rapat Lt. 4 Dinas PKP Provinsi di A.H. Nasution No. 20.

Dalam pembukaannya Anda Subrata menyampaikan "Memperkenalkan pada sistem aplikasi RTLH di Dinas PKP Provinsi, Serta Sistem Informasi RTLH Sumut. Dengan kita sama-sama akan memahami pada pengoperasian mulai dari pengisian vertikal dan menjadi data base-line. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) adalah salah satu program Pemerintah dalam menanggapi kebutuhan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan melibatkan swadaya masyarakat. Diperlukan peran serta semua untuk evaluasi dan verifikasi

yang akan dilakukan melalui tim teknis Provinsi dan tim teknis Kabupaten/Kota. Kedepannya semua usulan Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara disampaikan melalui aplikasi ini, kemudian tim verifikasi akan meninjau langsung dan memverifikasi usulan tersebut dan melakukan tindak atau terima usulan diaplikasi".

Terdapat peserta yang hadir telah digelaskan mengenai cara pengoperasian aplikasi dan membuka website



melakukan pembangunan rumahnya. Untuk

<http://dpu.kab.karasas.com> dan kemudian masukan user dan password yang sudah diberikan. Selanjutnya data yang sudah diinput dari kabupaten/kota akan diverifikasi oleh akun admin dari provinsi. Nanti akan ada level level pengguna di aplikasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kalau selama ini data data rumah-rumah disajikan secara manual oleh kabupaten/kota nantinya akan diserahkan ke dalam aplikasi manfaat yang didapat dari pengurangan proses pendaftaran dan pengurusan rehabilitasi rumah ini adalah terpeliharanya data, sehingga tidak perlu dilakukan berkali-kali yang berulang serta semakin ringkasnya proses verifikasi calon penerima bantuan rehabl RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sehingga tersedia cukup waktu untuk



## Sosialisasi mengenai Aplikasi Absensi online dan mengisi Sasaran Kerja Pegawai SKP Oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Provsu



Badan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan kunjungan Sosialisasi mengenai Aplikasi Absensi online dan mengisi Sasaran Kerja Pegawai SKP yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Provsu. Pertemuan diterima oleh Sekretaris Dinas Andri Setiawan. Sosialisasi diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.M Nasution No. 20 (11/01).

Fungsi Server BKD Provsu menyampaikan aplikasi kerja bisa didownload di playstore kemudian meng install aplikasi agar bisa digunakan. Sosialisasi diikuti oleh seluruh eselon III dan eselon IV

dan seluruh staf Dinas PKP Provsu

Pelaksanaan sosialisasi berjalan lancar dan para Aparatur Sipil Negara berminat untuk bertanya dengan hal yang kurang dipahami dan mengenai kendala yang dihadapi. Aplikasi Kerja digunakan untuk pendataan Turunpin Tambahan Penghasilan ASN agar meningkatkan efektifitas kerja para ASN.





## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Kab. Asahan



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Kab. Asahan. Pertemuan diadakan di Aula Kantor Dinas PRK Provinsi, A.H. Nasution No. 20 (2012).

Kunjungan kerja diamban langsung oleh Kepala Dinas Saptajiarto didampingi oleh Esplan H dan Esplan H. Dalam kunjungannya Komisi D DPRD Kab. Asahan ingin berkontribusi mengenai "bagaimana alokasi perumahan kumuh yang tidak masuk di dalam janda RT/RW, kemudian apakah ada bantuan yang bisa diberikan pemerintah provinsi mengenai anggaran kabupaten yang terbesar" ujar Jufenna DPRD Komisi D Kab. Asahan.

Yuni Kusnadi menjelaskan "pada siang untuk permukiman dimulai dari RT/RW untuk menentukan lokasi legalitas, jadi nilai esbat dari hasil pendirian apakah legalitas lahan plus atau minus" jelasnya.

Kodisa Marurung menambahkan "kami juga ingin meminta tolong kepada DPRD Kab. Asahan karena ada arahan dari K/PK Pusat untuk membuat perda penyerahan PSU dan perumatan developer ke pemda, kami meminta agar segera dibuat untuk penyerahan PSU kami memohon kerjasama kepada DPRD Kab. Asahan" tambahnya. (uff)



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappeda Kota Pematang Siantar

Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappeda Kota Pematang Siantar. Pertemuan diadakan di Aula Dinas PMP Provinsi di Jln A. Yani No. 20 Medan.

Kunjungan kerja diamban oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappeda Kota Pematang Siantar, Heryanto dan rombongan. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappeda Kota Pematang Siantar, Heryanto dan rombongan menyampaikan laporan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pematang Siantar.



Menyampaikan laporan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pematang Siantar.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk membahas masalah perumahan yang dihadapi masyarakat Kota Pematang Siantar. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappeda Kota Pematang Siantar, Heryanto dan rombongan.



Salah satu pembahasan yang dibahas adalah mengenai masalah perumahan yang dihadapi masyarakat Kota Pematang Siantar. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappeda Kota Pematang Siantar, Heryanto dan rombongan menyampaikan laporan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pematang Siantar.

Menyampaikan laporan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pematang Siantar.

Salah satu pembahasan yang dibahas adalah mengenai masalah perumahan yang dihadapi masyarakat Kota Pematang Siantar. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappeda Kota Pematang Siantar, Heryanto dan rombongan.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk membahas masalah perumahan yang dihadapi masyarakat Kota Pematang Siantar.

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Bupati Labuhanbatu Selatan



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Bupati Labuhanbatu Selatan Edman didampingi Asisten dan Kasubid PKP Labuhanbatu Tengah Chabakaria. Pertemuan diadakan di Ruang Sekretaris Dinas PPK J. S.H Niswanto No. 201 Jember, 28/02.

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas Muhammad Haidun Ikenna Ropala Dinas PPK Jember saat dengan Gubernur Sumatera Utara dalam kunjungannya Edman ingin meminta bantuan dari Provinsi untuk bantuan RTLH dan juga bantuan P50 di Kab. Labuhanbatu Selatan, karena anggaran Kab. Labuhanbatu Selatan yang sangat terbatas. Di Kab. Labuhanbatu masih banyak

kecamatan kumulatif dan P50 yang perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Kabid Rumah Swadaya Nida Sakti Harahab menyampaikan "untuk 2022 Labuhanbatu tidak mendapat bantuan RTLH karena tahun 2021 sudah mendapat bantuan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 50 rumah. Jadi di 2022 tidak mendapat bantuan" tambahnya.

Kadik Kawasan Permukiman Yudi Kusnadi menambahkan "pada 2021 dan 2022 belum ada bantuan yang diberikan kepada Kab. Labuhanbatu Selatan karena pada pertengahan Oktober kumulatif tidak ada dengan bulan 11, 25 Ha yang sesuai dengan kewenangan yang mendapatkan bantuan dari Indonesia dan SA Kumpulnya perlu diorotas karena lokasinya pada tahun 2017" tambahnya.

Ketua Badan Rumah Umum Zuber "pada Bidang Rumah Umum kami bisa membantu jika mendapat rumah bencana jika masuk dalam rencana aksi provinsi atau rumah rakyat dari korban pemerintah. Jika di Kab. Labuhanbatu terjadi bisa dibantu rumah yang rusak akibat bencana dan masuk dalam rencana aksi atau rumah yang terkena risiko korban pemerintah seperti perbaikan jalan, pembuatan jalan tol" ucapnya lusa.



## Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Membuka Pra Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Provinsi Sumut Zona Pantai Timur



**Kuala Tanjung** - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Membuka Pra Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Provinsi Sumut Zona Pantai Timur di Ballroom Inalam Building Office Center, dalam sambutannya Besar harapan Gubernur Sumatera Utara Musyawarah ini menghasilkan Program-program strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat, pada intinya Pemprov Sumut mendorong pentingnya penguatan sektor ekonomi dan infrastruktur di kawasan pantai timur ini, karena merupakan jalur industri yang sangat penting di Sumut ini baik dari segi pertanian, perikanan, kelautan, industri hingga pariwisata (Selasa, 01/03).

dihadiri oleh Bupati/walikota Wilayah Pantai Timur, Jajaran OPD Pemprovsu dan OPD Kab/Kota serta Undangan Lainnya, Edy Rahmayadi mengajak Pemkab/Pemko se- Wilayah Pantai Timur untuk membangun daerah yang lebih baik lagi dengan memperhatikan masyarakat yang saat ini dalam kondisi masih dilanda Covid 19 Varian baru yaitu Omicron.

Pramusrenbang ini juga membahas paparan dukungan strategis mengawal pencapaian target pembangunan serta peningkatan kualitas informasi birokrasi dalam rangka pencapaian target pembangunan menuju Sumatera Utara Bermartabat.

Acara ini dilanjutkan dan ditutup di Hotel Singapore Land Sei Balai Kab. Batubara. (jurnal)

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Kab. Pakpak Bharat



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Kab. Pakpak Bharat Putu Purito Soler. Pertemuan diadakan di Aula Kantor Dinas PKP di ARI Nasution No. 21 Medan, (12/11).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Bidang Rumah Swastaya Indra Satri Hasthap mewakili Kepala Dinas PKP Provinsi. Dalam kunjungannya Putu Purito Soler ingin berkoordinasi tentang Rehabilitasi RT/LH "apda saja syarat yang dibutuhkan dan harus disiapkan agar Kab. Pakpak Bharat bisa mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, karena di Kab. Pakpak Bharat sangat banyak kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni" ujarnya.

Indra Satri Hasthap menjelaskan "tabung RT/LH Kab. Pakpak Bharat mendapatkan bantuan Rehabilitasi RT/LH sebanyak 30 unit, untuk rumah yang terdapat masalah Tm. teknis yang akan ditentukan Oleh Kabupaten. Kemudian penerima manfaat akan menerima pemenuhan penerima manfaat akan diberikan jika dalam verifikasi penerima manfaat tidak memenuhi syarat akan diganti dengan list penerima manfaat berikutnya yang sudah direvisi dan akan ditentukan oleh kabupaten" jelasnya.

"Syarat sebagai penerima manfaat yaitu KTR, sudah berkeluarga, memiliki tanah dengan kepemilikan dalam sertifikat,

memiliki dan menempel rumah satu-satunya, dengan kondisi tidak layak huni, rumah dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat dengan kaca lantai paling rendah 30 meter persegi, bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni, rumah tidak memiliki kamar tidur, kamar mandi, cucu dan kawat (MCK), belum pernah mendapatkan bantuan rumah dari Pemerintah, bersyaratkan dapat bekerja sebagai upah minimum provinsi, penerima bantuan sanggup berswadaya dalam pelaksanaan bantuan,utamakan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibutuhkan dengan memiliki tabung bahan bangunan, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan Penerimaan Rehabilitasi RT/LH dan memiliki simpanan yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan Penerimaan Rehabilitasi RT/LH tambahannya (lalu)



## Pembukaan Acara Pra Musrenbang RKPD 2023 – Zona Kepulauan Nias



Teluk Dalam – Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi membuka Acara Pra Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Provinsi Sumut Zona Kepulauan Nias, Diikuti oleh Wakil Bupati dan Walikota Sepuluh Nias, Forklupinda, Para Pemimpin OPD Provinsi Sumatera Utara dan Pimpinan OPD Kabupaten/kota serta Stakeholder (TUI).

"Sumatera Utara sebagai Provinsi dengan segala kebhinekaannya akan memperbaiki, merenovasi, membuat jalan 73 kilometer yang ada di Nias, Dalam Samudranya"

Selanjutnya Eddy Rahmayadi juga meminta setiap pembangunan yg ada di Kepulauan Nias dilawati agar

Jalan sesuai dengan yang kita harapkan

Gubernur Sumatera Utara juga mendorong pentingnya penguatan sektor Pariwisata dengan infrastruktur yang baik, karena merupakan potensi yang menjanjikan di Kepulauan Nias.

Selain meningkatkan sektor pariwisata Eddy Rahmayadi menggaungkan Pemula/Pemula se- wilayah Kepulauan Nias, untuk meningkatkan kualitas dibidang pendidikan

Nias ini dianjurkan dan dituntut di masa depan nias nias sejaten (reel)



## Mari Kita Mengedepankan Kepedulian, Senergi Pembangunan Serta Mengambil Peran Tugas Masing-Masing Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan

Pemerintah Kabupaten/Kota



Medan - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara membuka sambutan dan membuka acara Forum Organisasi Penangkat Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Ir. Supriyanto, MM. Acara tersebut merupakan "Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Tahun 2022 di Hotel Grand Inna" yang dihadiri oleh kepala Rapperta Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Muara, Para Eksekusi di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, dan Kepala Rapperta serta Kepala Dinas PKH 12 Kabupaten/Kota, (11-11 Maret).

Dalam sambutannya Supriyanto menyampaikan,

tantangan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman hanya bisa kita hadapi dengan mengedepankan kepedulian, seneng pembangunan serta mengambil peran tugas masing-masing antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota

"Oleh sebab itu marilah kita sama-sama berpartisipasi untuk memberikan masukan dan usulan yang berkaitan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman Teganya."

"Dimana hal ini bertujuan agar terdapatnya rencana pembangunan yang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama untuk mengurung luas kawasan kumuh yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan juga mengurung rumah yang tidak layak huni. Tambahnya."

selanjutnya acara dilanjutkan dengan Diskusi Kelompok Desk Berlangsung selama 2 hari yaitu hari Rabu dan Kamis

Acara ditutup oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, dipaparkan dengan sesi foto bersama dengan para OPD Kabupaten/kota. (widi)



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Langkat



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi SK Kumuh Kabupaten Langkat oleh Tim Verifikasi Tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PM/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Jenderal A.H. Nasution No. 201/Geb. 15/101.

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Muhammad

Maldar mewakili Kepala Dinas PUP Provinsi. Selanjutnya Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Langkat menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh kabupaten Langkat, kawasan kumuh dengan luas 11-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada di Kelurahan Sei Biah, Desa Perlis 4 dan Desa Serang Jaya.

Dari hasil verifikasi, pendataan kelengkapan Readiness Criteria SK Kumuh Kabupaten Langkat, untuk Kelurahan Sei Biah dan Desa Serang Jaya akan dilakukan dekonsentrasi terkait dengan poligon dan kawasan. Lokasi yang masuk dalam poligon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Langkat juga.



## PRA MUSRENBANG PENYUSUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA ZONA DATARAN TINGGI TAHUN 2023



Hotel Nagara Padang, Simalungun (14/01/22). Pembukaan acara Ceremonial Pra Musrenbang Zona Dataran Tinggi Kabupaten Simalungun oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Turut hadir para Kepala Daerah Seluruh Kabupaten Kota Kawasan Dataran Tinggi, Bupati Simalungun Karjawan Hasibolan Sinaga, Bupati Dan Edy Kembang Ate Benutu, Bupati Kari Cery Simadly Setyayang, Wakil Bupati Paksiak Bharat Mulyuhito Solin, Bupati Samosir Vandine Gultom, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Oron Hamran Hasibolan dan Wakil Bupati Tajanuli Utara Nikson Nababan.

"Semangat yang selalu disampaikan untuk seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota bahwa sudah saatnya kita perankan pembangunan infrastruktur khususnya jalan, jembatan, akses

perwisata, industri, pertanian, dll, karena sebelumnya di tahun 2021 sempat tertunda akibat wabah covid sehingga anggaran untuk penanaman LDRN-20, apalagi kawasan Danau Toba sudah menjadi salah satu kawasan ekonomi super prioritas nasional yang kedepannya akan menjadi salah satu pusat pariwisata unggulan di Indonesia, sebagai upaya agar pembatasan ini benar-benar kita prioritaskan dalam mendukung program pemulihan ekonomi di Sumatera Utara yang".

"Catatan sejarah", di lain kesempatan para Kepala Daerah Kabupaten Kota Zona Dataran Tinggi Provinsi Sumatera Utara memuji kebijakan Gubernur Edy Rahmayadi terkait penangan infrastruktur yang dibidagkan untuk daerah mereka pada tahun 2022-2023. Anggaran sebesar Rp. 731 Miliar merupakan suatu sejarah yang luar biasa yang pernah dibelikan oleh Gubernur Sumatera Utara, karena baru kali ini

Kabupaten Kota yang ada di Zona Dataran Tinggi Provinsi Sumatera Utara mendapatkan dana yang luar biasa. Termasuk Pak Gubernur Hal ini dikatakan Bupati Simalungun Karjawan Hasibolan Sinaga mewakili Kepala Daerah Kabupaten Kota Zona Dataran Tinggi meliputi Kabupaten Simalungun, Kari, Danri, Paksiak Bharat, Pematang Siantar, Bata, Samosir, Tajanuli Utara dan Humbang Hasundutan saat Pra Musrenbang Zona Dataran Tinggi di Hotel Nagara Padang (ulu).





## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Tebing Tinggi



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi SK Kumuh Kota Tebing Tinggi oleh Tim Verifikasi Tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 34/PM/2021 tentang Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Jumat, 18/03).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Muhammad Halbur mewakili Kepala Dinas PWP Provinsi

Kemudian Tim verifikasi SK Kumuh Kota Tebing Tinggi menyampaikan hasil verifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kota Tebing Tinggi. Kawasan kumuh dengan luas 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada sebanyak sembilan belas lokasi.

Dari hasil verifikasi pendataan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tebing Tinggi sedang dalam proses review agar data kawasan kumuh sesuai dengan perubahan pola ruang yang sedang diproses review. Kota Tebing Tinggi belum memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTL). Ada sembilan belas lokasi kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha yang akan dilakukan delimitasi ulang serta dilakukan pengetakan kembali peta dan numerik nya. Lokasi yang masuk ke dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan perumutan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi.

Acara ditutup oleh Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Batubara



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi SK Kumuh Kabupaten Batubara oleh Tim Verifikasi Tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 34/PM/2021 tentang Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Senin, 22/03).

Acara dibuka oleh Kepala Dinas PWP Provinsi, Supriyanto. Selanjutnya Tim verifikasi SK Kumuh Kabupaten Batubara menyampaikan hasil verifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten Batubara, kawasan kumuh dengan luas 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada tujuh kawasan.

Dari hasil verifikasi kelengkapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Batubara untuk kawasan Sagori Anya, Kawasan Bendu Siam, kawasan Tembung Turan akan dilakukan delimitasi ulang. Kabupaten Batubara belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sedang dalam proses di Kementerian PU. Ada lima lokasi kawasan Paguruan dan kawasan Berbung berdekatan kawasan yang terpengaruh air dengan luas yang cukup signifikan disebabkan adanya RKB yang dominan setiap bulannya dan kurang dimasse dikawasan tersebut. Lokasi yang masuk ke dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan perumutan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batubara.

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu bersama Tim Verifikasi Provinsi melakukan Verifikasi SK Kawasan Kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan

Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu bersama Tim Verifikasi Provinsi melakukan verifikasi SK Kawasan Kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PR/PL/2021 tentang Penyelenggaraan dan Pemertanian Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 20 Medan (Kamis, 24/3).



Sementara itu, Sekretaris Dinas PNP Provsu,

Muhammad Haidur, S.Sos, M.Si., mewakili Kepala Dinas PNP Provsu. Dari hasil verifikasi secara administrasi terhadap SK Kawasan Kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai data SK Kawasan Kumuh, profil kawasan kumuh, data numerik dan peta delineasi kawasan kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat 4 (empat) kawasan yang menjadi kewenangan provinsi dengan luas kawasan 13 Ha sampai dengan 25 Ha, terdiri dari 1 (satu) kawasan yang sudah masuk dalam SK Kawasan Kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 yang berada di Desa Negeranibu II Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Hartotuhin Kecamatan Unan Gunung dan Desa Sihombing Kecamatan Tabalibing. Adapun 3 (tiga) kawasan lainnya



merupakan kawasan yang diusulkan akan masuk dalam SK Kawasan Kumuh hasil revisi, berada di Desa Hutagaung, Desa Palarin Batu dan Desa Pelling, ketiganya berada di Kecamatan Pelling.

Untuk 4 (empat) kawasan tersebut, perlu dilakukan delineasi ulang, karena masuk dalam delineasi beberapa kawasan yang bukan permukiman, dan beberapa kawasan terdelineasi bukan merupakan 1 (satu) kampung. Juga perlu dikoreksi data numerik, profil kawasan beserta NTA koordinat sesuai peta hasil delineasi ulang untuk 4 (empat) kawasan tersebut. Hal tersebut juga perlu dilakukan untuk kawasan kumuh

lainnya di Humbang Hasundutan, karena memungkinkan adanya perubahan jumlah kawasan kumuh kewenangan provinsi, pusat maupun daerah.

Kabupaten Humbang Hasundutan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga dalam identifikasi kawasan perumahan dan permukiman wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan, delineasi kawasan kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan agar di-sertakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menuju kesesuaian penemukannya dengan pola ruang perumahan dan permukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terkait kegiatan tanah pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan perlu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan/Kantor Kabupaten Humbang Hasundutan (Kantab).

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Binjai



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan verifikasi SK Kumuh Kota Binjai oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H. Nasution No.20 (Jumat, 25/03).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PUP Provsu Muhammad Hatim mewakili Kepala Dinas PUP

Provsu kemudian Tim verifikasi kota Binjai menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh kota Binjai. Kawasan kumuh dengan luasan 20-25 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi atas 12 (dua belas) kawasan yang ada di dalam 14 Kawasan Kumuh.

Dari hasil verifikasi SK Kumuh Kota Binjai sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) sesuai perda No 3 Tahun 2020, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sedang dalam penyusunan Materi Teknik. Ada beberapa kawasan yang perlu didelineasi ulang karena bukan diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan selanjutnya akan di cek kesesuaian dengan peruntukan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW). Lokasi yang masuk ke dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pada ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) yaitu



Mei 25, 2022 10:45 Pagi

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan pembukaan acara Verifikasi SK Kumuh kabupaten Karo



Medan - Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan pembukaan acara verifikasi SK Kumuh kabupaten Karo. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2021 tentang Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu 2, Jendral A.H Nasution No.20 (Jumat, 25/05).

Kemudian Tim Verifikasi Kabupaten Karo menyampaikan hasil verifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten Karo. Ditn hasil verifikasi SK Kumuh Kabupaten Karo sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai perda No. 4

Tahun 2022. Kabupaten Karo belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perlu dilakukan penyempurnaan delimitasi

aleng sektus kawasan termasuk titik koordinat, kesesuaian pola ruang permukiman dengan memperhatikan delimitasi sebagai satu kesatuan. Ada beberapa kasus perlu dibenahi ulang, karena masuk didalamnya yang bukan kawasan permukiman dan dicek kesesuaiannya dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW dan spot-drainase/drainase dengan dokumen RTWK terkait regulasi zat baik kawasan kumuh maupun kawasan rawan bencana. Lokasi yang masuk ke dalam polygon merupakan lokasi lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo (Juli).



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Ujian Kompetensi kepada Calon TFL untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah T.A 2022



Medan - " pada ujian ini saya berharap agar para peserta dapat berungguh menunggu dalam mengikuti ujian dan mendapatkan hasil yang terbaik dan dapat bergabung menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Saya harap TFL yang terpilih adalah tenaga-tenaga yang berdedikasi tinggi", berikut adalah salah satu kutipan pidato pembukaan oleh Ir. Supriyanto, MSc selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera saat membuka acara Ujian Kompetensi kepada Calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Ujian kompetensi kepada Calon TFL untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah T.A 2022, di Medan Hari: JL. Andalas No. 1 (Kamis, 31/03).

Ujian kompetensi terdiri dari Ujian Teoritis, Ujian Praktek (komputer) dan Wawancara. Dari 57 Peserta yang lulus seleksi administrasi hanya 50 peserta calon TFL yang datang dan mengikuti ujian kompetensi. TFL Peserta mengikuti ujian dimulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 14:00 WIB. Dalam mengikuti ujian para peserta tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak 1,5m.

TFL yang terpilih nantinya akan dipekerjakan di 11 kabupaten/ kota yaitu Kabupaten Nias, kabupaten Deli Serdang, kabupaten Labuhanbatu, kabupaten Langkat, kabupaten Nias Selatan, kabupaten Padang Lawas Utara, kota Tanjung Balai, kota Siboga, kota Tebing Tinggi, kota Padang Sidempuan dan kota Pangkajene Kepulauan.



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Asahan



Kediri - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan verifikasi SK Kumuh Kabupaten Asahan oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Keperaturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/2018 tentang Percepatan dan Peningkatan Kualitas Tersedia Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jenderal A.H. Nasution No. 20 (Kamis, 07/04). Acara dibuka oleh Pj. Kabid Kawasan Permukiman Syarifah Mawati Kepala Dinas PUM Provsu. Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kali Asahan menyampaikan hasil verifikasi awal

pendataan  
kalahkapan  
data



kawasan kumuh kali Asahan. Kawasan kumuh dengan luas 12-15 Ha sesuai kewenangan provinsi ada 2 kawasan yaitu di Kelurahan Siantang Kali, Kawasan Timur dan di Kelurahan Sidodadi kec. Kisaran Barat.

Dari hasil verifikasi kabupaten Asahan sudah memiliki RT/RW sesuai Perda No. 12 tahun 2012, namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kelurahan Siantang kec. Kisaran Timur dan di Kelurahan Sidodadi kec. Kisaran Barat masih perlu melakukan penyempurnaan yang termasuk tdk koordinat, kesesuaian pola ruang permukiman, dengan memperhatikan desain sebagai satu hamparan. Lokasi yang masuk dalam wilayah merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peraturan pola ruang dalam RT/RW Kabupaten Asahan (Lb).

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Sibolga



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Hasbiun membuka verifikasi SK Kumuh Kota Sibolga oleh Tim verifikasi Provinsi sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 31/PM/2021 tentang Pemegahan dan Pemogakan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman A, Jendral A.H. Nasution No. 20, Medan, 13-04-2023.

Acara dibuka oleh Sekretaris Muhammad Hasbiun mewakili Kepala Dinas (KH) Prodesu, dan didampingi oleh eselon II dan eselon IV. Selanjutnya Tim verifikasi SK Kumuh Kota Sibolga menyampaikan hasil identifikasi awal

pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kota Sibolga. Kawasan kumuh dengan luasan 20-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada 4 kawasan yaitu Kawasan I Kelurahan Sirih Naui Ling 1 dan 2, Kelurahan Muta Berangan Ling 3, Kawasan II Kelurahan Aek Mame Ling 1, 4, 5 dan 6, Kawasan III Kelurahan Aek Mame Ling 2, 3, 4 dan 7 dan Kawasan IV Kelurahan Pasar Belakang Ling 1, 2, 3 dan 4.

Dan hasil verifikasi Kota Sibolga sudah memiliki RT/RW sesuai Perda No. 2 tahun 2018, dan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kemudian format SK Kumuh akan dilakukan kawasannya sesuai dengan poligon diwinaisi dengan masing-masing poligon tidak berbasis lingkungan. Akan dilakukan penyempurnaan delineasi untuk Kawasan II dan Kawasan IV agar disesuaikan dengan pola ruang perumahan dalam RT/RW. Lokasi yang masuk dalam poligon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan perumahan pola ruang dalam RT/RW Kota Sibolga yaitu



## Dinas PKP Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Pematangsiantar



Medan - Dinas PKP Provsu melakukan verifikasi SK Kumuh Kota Pematangsiantar oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Keperaturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRTM/2018 tentang Penetapan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Gedung A.H. Nasution (Rabu, 28-04).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Muhammad Haidun dalam pembukaannya Muhammad Haidun menyampaikan "verifikasi penilaian kelengkapan readiness criteria SK Kumuh bertujuan agar pendataan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan data yang ada di lapangan

dan sesuai dengan RTW yang sudah ada, dan untuk mempermudah karena ini juga kita bersama supaya tidak memusuk yang bukan kawasan permukiman sebagai kawasan kumuh untuk mencapai target 10 - 15 Ha yang merupakan kewenangan Provinsi" ujarnya.

Kemudian Tim verifikasi SK Kumuh Kota Pematangsiantar menyerahkan hasil verifikasi dan melengkapi data kawasan kumuh Kota Pematangsiantar. Kawasan kumuh dengan luas 20-25 Ha sesuai dengan kewenangan provinsi ada 3 kawasan yang disetujui yaitu Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Heger Negeri Kecamatan Siantar Marhaen, Kelurahan Nagi Pita Kecamatan Siantar Marhaen, Kelurahan Gumanti Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Timuan Kecamatan Siantar Timur.

Dari hasil verifikasi Kota Pematangsiantar sudah memiliki RTW sesuai Perda No 1 Tahun 2011 namun belum memiliki Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR). Terdapat 2 (dua) kawasan yang memungkinkan masuk kumuh dengan luas 20 Ha s.d dibawah 15 Ha, yaitu Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Nagi Pita Kecamatan Siantar Marhaen, Kelurahan Gumanti Kecamatan Siantar Barat, namun harus dilakukan divisi ulang kawasan, serta update data numerik dan profil SK Kumuh. Lokasi yang masuk dalam payung merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan penentuan pola ruang dalam RTW kota Pematangsiantar (Luf).



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Padangsidempuan



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi SK Kumuh kota Padangsidempuan sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 34/PM/2018 tentang Pemertan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Jl. Jenderal A.H. Nasution (Kamis, 21/04).

Pembukaan acara dilakukan oleh Sekretaris Dinas Muhammad Halim, dalam pembukaannya Muhammad Halim menyampaikan "Verifikasi SK Kumuh harus dilakukan bersama-sama agar SK Kumuh Bangun

luas 10-15 HA bisa dilakukan bersama dan diklat dengan RT/RW agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada" ucapnya.

Selanjutnya Tim verifikasi SK Kumuh kota Padangsidempuan menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kumuh kota Padangsidempuan. Kawasan kumuh dengan luas 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan provinsi ada 2 kawasan yaitu lingkungan 2 Pagar Keling, Kawasan Aek Batang Ayem (Judeh Karim), Kawasan Aek Batang Ayem (Dokter Wel W).

Dari hasil verifikasi kota Padangsidempuan, sudah memiliki RT/RW sesuai Perda No. 4 Tahun 2014 dan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tidak ada peta delimitasi terdapat 2 (dua) kawasan yang masuk dalam kawasan kumuh dengan luas 10 Ha-15 di bawah 15 Ha yaitu Kawasan 24 Sek. Lingkungan 2 Pagar Keling, Kawasan Aek Batang Ayem, namun belum dilakukan delimitasi yang kawasan, serta update data numerik dan profil kumuh. Terutama kawasan Aek Batang Ayem yang semula menjadi 2 (dua) kawasan namun masuk didatarnya infrastruktur skala besar. Lokasi yang masuk dalam program merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan penentuan pola ruang dalam RT/RW kota Padangsidempuan, juga



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Pakpak Bharat



Kediri - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi SK Kumuh Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10/PRT/2021 tentang Penetapan dan Derajat Kualitas Tertutup Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jl. Jendral A.H. Nasution Lantai 22/04.

Sekretaris Dinas Muhammad Mastun membuka acara tersebut Kepala Dinas PUPR Prosu. Dalam pembukaannya Muhammad Mastun menyampaikan "Kawasan Kumuh dengan Luas 10-15 Ha yang akan dilakukan verifikasi harus dilakukan bersama-sama

pada semua aspek dan dilakukan dengan berkesinambungan. Dan dilakukan sesuai dengan RT/RW agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak berbentangan dengan peraturan yang ada" ujarnya.

Selanjutnya Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Pakpak Bharat menyampaikan hasil verifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh kabupaten Pakpak Bharat dengan Luas 10-15 Ha sesuai dengan ketentuan Permen PUPR yaitu kawasan Sukrama Kecamatan Kabanjahe dan kawasan Karaman Kecamatan Pangepeng Ceting. Berikut, tim harus melakukan kelengkapan data kawasan kumuh.

Dari hasil verifikasi Kabupaten Pakpak Bharat sudah memiliki RT/RW sesuai Perda No. 1 Tahun 2021 dan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penyempurnaan Dokumen agar dilaksanakan dengan pola ruang permukiman Permukiman dalam RT/RW. Data titik koordinat akan ditampilkan dalam map yang bisa koordinat atau titik titik tersebut sesuai poligon garis kawasan (area).



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan DPRD Provsu untuk Evaluasi LKPJ Dinas PKP Provsu T.A 2021



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan DPRD Provsu untuk Evaluasi LKPJ Dinas PKP Provsu T.A 2021. Pertemuan diadakan di Aula Direk Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20/12/04.

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas PKP Supriyanto didampingi Sekretaris Dinas Muhammad Haidun beserta eselon II dan eselon III. Pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Wagner menyampaikan "apakah alasan mengapa Dink Seidang tidak mendapatkan bantuan untuk RT/LH" ujarnya, kemudian Hendro juga menanyakan "kualitas belanja modal tidak sesuai dengan yang diharapkan apakah jaminan sesuai dengan belanja modal?" tambahnya. Syarif juga

menyampaikan "apa belanja kawasan rumah dengan kawasan perumahan biasa dan permukiman kudu menentu langsung ke lapangan?" tambahnya

Ketua Rumah Swadaya MDK Sawti Harafap menyakan "Kabupaten Deli Seidang akan mendapatkan bantuan RT/LH pada tahun 2022. Kabupaten mata secara bergantian mendapatkan bantuan RT/LH karena keterbatasan anggaran yang ada" ujarnya.

Kemudian Anggota Dinas Supriyanto menjawab "tapi hasil pemeriksaan kualitas dan kuantitas untuk T.A 2021 kita tidak ada TUK, ini merupakan hasil pemeriksaan BPK. Sawi juga melakukan peninjauan lapangan ke lapangan mengcek progres pada saat pelaksanaan RT/LH dan didampingi oleh posmas dan TN, yang ada di kabupaten kota tersebut" jawabnya lulu.



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai dan Evaluasi untuk Progres Kegiatan Dinas PKP Provsu



kebersamaan tim dalam bekerja dan diharapkan seluruh kegiatan dapat terlaksana dan terselesaikan paling lama minggu pertama bulan Desember 2022. (uPa)

Bedau - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai dan Evaluasi untuk Progres Kegiatan Dinas PKP Provsu. Rapat diadakan di aula Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H. Nasution No. 20/122020. Dalam rapat evaluasi tersebut membahas mengenai evaluasi optimalisasi kinerja ASN, peningkatan disiplin kerja dan progres/evaluasi rencana aksi Dinas PKP Provsu sesuai Renc 2022. Saat ini jumlah pegawai yang ada di Dinas PKP Provsu yang terdiri dari 77 ASN dan 12 non ASN dan kurangnya tenaga teknis hanya 25% dari jumlah pegawai.

Dalam kesempatan lain Sekretaris Dinas Muhammad Masbur juga menyampaikan harapan dan arahan yaitu perlunya meningkatkan



## Hari Kebangkitan Nasional 2022 Ayo Bangkit Bersama!



Nedari - Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. Muhammad Halidin, S.Sos M.P sebagai Inspektur dalam pelaksanaan upacara peringatan ke-114 Hari Kebangkitan Nasional Jumat, di halaman Kantor Dinas PKT Provinsi di A.H. Nasution No. 20/20/06.

Muhammad Halidin menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 memiliki tema "Ayo Bangkit Bersama!" Tema ini diangkat dalam rangka seruan kebangkitan bersama bangsa Indonesia setelah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun lebih.

"Semangat kebangkitan dan optimisme dalam menghadapi kondisi Indonesia saat ini yang masih berjuang di tengah kondisi ekonomi dunia, tantangan geopolitik global, dan juga tentunya beresik sedikit demi sedikit mencoba bangkit dari pandemi Covid-19. Kita pun diingatkan kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa".ujarnya.

"Momentum yang baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai Presiden Call tahun 2022 pada Presiden Call tahun ini. Indonesia mengasung tema Resilient Together. Resilient Stronger. Dengan tujuan dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif serta menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan". Tamahnya juga.



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Nias Selatan



Nias - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi SK Kumuh Kabupaten Nias Selatan oleh Tim verifikasi Provinsi sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PP/2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Bidang Kawasan Permukiman Dinas PUP Provinsi, J. A. H. Nababan Jember 02/05/2022.

Acara dibuka oleh Pjs. Kabid KP Yuli Kurniasih, kemudian Tim verifikasi SK Kumuh Kabupaten Nias Selatan menyampaikan hasil identifikasi dan kompilasi data kawasan kumuh Kabupaten Nias Selatan, Kawasan kumuh

dengan jumlah 02 (2) RW sesuai dengan kewenangan Provinsi ada 30 (tiga puluh) delapan kawasan yang diukuhkan.

Dari hasil verifikasi kabupaten Nias Selatan sudah memiliki RT/RW sesuai Perda Nias tahun 2019 namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Lingkungan dan Lingkungan (RTL). Dari 30 tiga puluh delapan kawasan yang diukuhkan semua kawasan perlu diukuhkan kembali mulai dari identitas, data sumbu, profil kumuh, dan data spasialnya dengan catatan satu polygon merupakan satu kampung tidak dibatasi wilayah administrasi dan polygon tersebut tidak boleh ada infrastruktur jalan beton serta sumbu, rd dan kawasan kumuh. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan penentuan pola yang dalam RT/RW Kabupaten Nias Selatan juga.



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Padang Lawas Utara



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi SK Kumuh Kabupaten Padang Lawas Utara oleh Tim verifikasi Provinsi sesuai dengan Kawasan Perumahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/1971/M/DJ/DK tentang Penetapan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jl. Jenderal A.H. Nasution No. 20 Medan - 20101.

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PPK Muhammad Habibul Hamdani dan Tim verifikasi SK kumuh Kabupaten Padang Lawas Utara. Kawasan kumuh dengan jumlah 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi terbagi 4 tempat:

kawasan kumuh yang di verifikasi.

Dari hasil verifikasi Kabupaten Padang Lawas Utara sudah memiliki RTN sesuai Perda No. 2 Tahun 2020 namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDR). Untuk itu usulan kawasan kumuh dipecah belah agar disesuaikan dengan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan penentuan pola ruang dalam RTN Kabupaten Padang Lawas Utara, dan ditampilkan status legalitas lahan. Data titik koordinat akan ditayangkan dalam empat titik koordinat atau titik-titik terluar sesuai poligon peta kawasan. Lokasi yang masuk dalam groyong merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan penentuan pola ruang dalam RTN Kabupaten Padang Lawas Utara (rta).



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 14/PM/2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Tempat Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, J. Jendral A.H. Nasution No. 21 (Seni, 30/05).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PKP Muhammad Kaidun, kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang menyampaikan hasil identifikasi dan kelengkapan data kawasan

kumuh Kabupaten Deli Serdang, kawasan kumuh dengan luas 10/11 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi, terdapat 6 (enam) kawasan kumuh yang diumumkan.

Dari hasil verifikasi Kabupaten Deli Serdang sudah memiliki RTM sesuai Perda No. 2 tahun 2021 namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Desa Teluk Nibab tidak masuk dalam kawasan kumuh karena sebagian kawasannya hutan lindung. Dari kawasan kumuh yang diumumkan semua perlu di evaluasi kembali mulai dari data awal, data numerik, profil kumuh, dan data spasialnya dengan catatan satu polygon merupakan satu kamparan, tidak dibatasi wilayah administrasi dan polygon tersebut tidak boleh ada infrastruktur skala besar seperti jalan, air dan kawasan hijau. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan penertakan pola ruang dalam RTM Kabupaten Deli Serdang. (luf)



Foto Dokumentasi Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Rapat Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi Sei Bilah Langkat



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Rapat Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi Sei Bilah Langkat di Ruang Rapat Lt. II Dinas PUP Provsu, Jl. A.H. Nasution No. 20 Medan, 07/06/2022.

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas Muhammad Haldun, selanjutnya Kabid Kawasan Permukiman Idris Zulfikar menyampaikan "Role Model Pembangunan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi Sei Bilah Langkat ini sesuai dengan SK Gubernur No. 106/44/2015/PT/2022 terdapat 54 Kegiatan Strategis Daerah salah satunya Pembangunan Role Model Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Terintegrasi dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1000

unit. Ini juga sesuai Depot UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan PUPM No. 14/2011 SK 2011 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. Ada tujuh kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang diatur dalam Permjen PUPM No. 14 Tahun 2014 yaitu bangunan pedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pemeliharaan pemukiman dan perilaku ketertarikan" ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Pemantapan Kawasan Hutin Wilayah Sei Bilah Daulay menyampaikan "untuk segera survey ke lapangan untuk mengambil titik koordinat kawasan kumuh Role Model Langkat di kawasan Sei Bilah. Dilakukan bersama Dinas Kehutanan Provsu, Dinas SOACR Provsu, Balai Pemantapan Kawasan Hutin Wilayah I, dan Balai Pengkajian Daerah Aliran Sungai dan Hutin Lintang Wampu Sei Bilah. Survey lapangan dilengkapi bentuk Acra dan hasil pemetaan Role Model Langkat segera mungkin dibawa ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ditampung Dinas Kehutanan Provsu. Dinas SOACR Provsu, Balai Pemantapan Kawasan Hutin Wilayah I, dan Balai Pengkajian Daerah Aliran Sungai dan Hutin Lintang Wampu Sei Bilah" ujarnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Siman Singar menambahkan "berkat lokasi kawasan Role Model Langkat, agar kawasan diolahkan untuk permukiman kumuh dan untuk wisata" tambahnya.



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan Pembinaan dan Monitor atas Penertiban Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



Batu Bara – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan Pembinaan dan Monitor atas Penertiban Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2009 dan salah satu penilaian KPI dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Koordinasi Pembudayaan Kinerja dan menentukan nilai CPM. Acara dilaksanakan di Singapore City Hotel Jalan Lintas Sumatera KM 141, Batubara (Kab. Batubara).

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas PKP Provinsi Supriyanto dalam pembukaannya "saya berharap kepada kabupaten/kota untuk bisa berpartisipasi dan aktif untuk menginput di Ujarnya, Wiyata Pratama Tim IT Aplikasi

dalam aplikasi Sistem Presensi untuk meningkatkan penilaian CPM oleh KPI"



Selama Presensi menjelaskan penggunaan aplikasi

bisa di buka di klatempresensi.cib dengan memasukkan user dan password yang sudah dibagikan kepada kabupaten/kota, kemudian kabupaten/kota bisa menginput dengan membuat ssk terbaru baru, tambah data sarana dan prasarana, detail sarana dan prasarana, upload sertifikat sarana dan prasarana dan bisa langsung membuat Berita Acara Serah Terima Sarana dan Prasarana.

Acara ini dihadiri oleh 12 kabupaten/kota Zona Perairan Timur Kabupaten Asahan, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Kabupaten Batu Lintang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, dan kota Tanjung Balai.

Acara ditutup dengan sss foto bersama. (sifa)

14 Mei 2022 | Provsu.com

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni T.A 2022



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni T.A 2022 di Hotel Grandhika J. Di. Manasse No. 103 Medan, (11/5/22).

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas PKP Muhammad Haldun mewakili Kepala PKP Provsu "Bantuan rumah tidak layak huni adalah bantuan stimulan berupa bahan bangunan/material untuk rumah suadaya yang diberikan pemerintah provinsi Sumatera Utara bagi masyarakat kurang mampu untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan dalam peningkatan kualitas rumah. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengproyeksikan

Bantuan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha, sebanyak 300 unit di 12 Kabupaten kota yaitu di Kab. Karo, Kab. Deli Serdang, Kab. Labuhan Batu, Kab. Langkat, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Nias Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Kecamatan Sibolang, Kab. Padang Sidimpuan, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai" ujarnya.

"Rapat koordinasi dan penyampaian usulan ini bertujuan untuk agar terlaksananya pemenuhan kebutuhan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berbasis data database yang akurat dan akurat serta terjalinnya sinergitas antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah" tambahnya (lft).



14 Mei 2022 | Provsu.com

## DINAS PKP PROVSU MELAKSANAKAN ACARA PISAH SAMBUT KEPALA DINAS PKP PROVSU



Medan - Kepala Dinas PKP Provsu tentahulu Bapak H. Supriyanto, MN menyerahkan jabatan Kepala Dinas PKP Provsu kepada Bapak H. Adi Syarif, ST, R, Eng.Sc, acara tersebut di lakukan di lingkungan Dinas PKP Provsu yang dihadiri oleh Para Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Staf Dinas PKP Provsu. (12/05)

Supriyanto menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan Para Kepala Bidang, Para Pejabat Fungsional dan Staf Dinas PKP Provsu yang telah membantu serta melaksanakan tugas Kepala Dinas.

Selanjutnya Kepala Dinas PKP Provsu yang baru Adi Syarif menyapa seluruh ASN yang ada di lingkungan Dinas PKP Provsu.

Kemudian Acara di tutup dengan foto bersama (lft).



July 12, 2022 09:14 AM | [Jurnal Online Kominfo Sumatera](#)

## Dinas PKP melakukan Pelatihan dan Pembekalan TFL Kegiatan RLTH Provinsi Sumatera Utara

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi melakukan Pelatihan dan Pembekalan Tenaga Facilitator (TFL) untuk kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grandhisa Jl. Dr. Mansur No. 50 Medan (12/07).

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas PKP Muhammad Haldun mewakili Kepala PKP Provinsi. Pelatihan dan pembekalan TFL ini dilakukan untuk mendapatkan TFL yang berkualitas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk memverifikasi identifikasi kelayakan, rumah warga, pelaksanaan



Sehuku dan Tim komputer untuk mengerjakan tugasnya rutin

serta monitoring dan pengawasan. Kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan stimulus yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sumatera utara bagi masyarakat kurang mampu untuk mendongeng dan meningkatkan kelayakan (jalan, peningkat kualitas rumah) rumahnya.

Pelaksanaan Pelatihan dan Pembekalan Facilitator Rehabilitasi (TFL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Sumatera Utara T.A 2022 dilakukan mulai 12 - 15 Juli 2022. Tenaga Facilitator Lapangan (TFL) nantinya akan didampingi dan dibantu oleh Tim

## Dinas PKP menerima kunjungan kerja dari Komisi B DPRD Kabupaten Toba



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi menerima kunjungan kerja dari Komisi B DPRD Kabupaten Toba. Pertemuan dilakukan di Aula Dinas Kantor PKP Provinsi di A.M. Nasution No. 20 Medan (18/12).

Kunjungan kerja diambut oleh wakil Kawasan Perumahan Irfan Zulfkar mewakili kepala Dinas PKP Provinsi didampingi oleh Zubir Kabid Rumah Umum. Pada kesempatan tersebut anggota DPRD Kab. Toba Tedyan Marung menyampaikan “Kabupaten Toba membutuhkan DED apa saja yang diperlukan agar Kabupaten Toba bisa mendapatkan bantuan tersebut” ujarnya.

Kabid Kawasan Perumahan Irfan Zulfkar menjelaskan an untuk mendapatkan bantuan DED Kawasan Perumahan Kumuh, Dinas PKP Kabupaten Toba harus mengajukan utusan verifikasi Kawasan Kumuh ke Dinas PKP dan Tim Verifikasi Provinsi akan melakukan verifikasi lapangan. Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan pada kawasan kumuh dengan luasan 10 – 15 Ha, kawasan kumuh 0 – 10 Ha, sedangkan kewenangan Kabupaten/kota dan kawasan kumuh di atas 15 Ha merupakan kewenang Pemerintah Pusat” jelasnya. (utb)



## Dinas PKP Mengadakan Rapat Pleno dengan 6 Kabupaten/Kota

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Rapat Pleno antara Tim Verifikasi Penilaian Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/Kota. Rapat diadakan di Aula Lt. 2 Dinas PNP Provinsi (Selasa, 19/7).

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas PNP Provinsi AKB Syahriza dalam pembukaannya. "Rapat Pleno ini merupakan hasil verifikasi Tim Daerah Provinsi dan akan menjadi hasil rekomendasi kawasan Kumuh yang akan diusulkan dalam SK Kumuh Kabupaten/Kota dan nantinya Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti hasil Rapat Pleno ini" ujarnya. Rapat ini dihadiri



dari Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Langkat, Kota Tanjung Balai, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Deli Serdang.

Dari hasil verifikasi administrasi, verifikasi data hasil identifikasi awal, data hasil penilaian, serta konsultasi data spasial kawasan dan verifikasi teknis lapangan terkait kawasan kumuh yang telah dilaksanakan, pada Kabupaten Lubuklinggau terdapat 4 (empat) Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh yaitu Kawasan Aek Pang Bawah, Kawasan Laut Mada - Bagan, Kawasan Perumahan II, Kawasan Rukun Perumahan. Kota Tanjung Balai terdapat 3 (tiga) kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh yaitu Kawasan Pasar Baru I, Kawasan Pasar Baru II, Kawasan

Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh yaitu Kawasan Laut Dendang, Kawasan Melueta, Kawasan Rantau Panjang, Jalle

## Dinas PKP Mengadakan Rapat Pleno dengan 8 Kabupaten/Kota



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) mengadakan Rapat Pleno dengan Tim Verifikasi Pemilihan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/Kota. Rapat diadakan di Aula Lt. 2 Dinas PKP Provinsi (Rabu, 20/07).

Acara dibuka oleh Kabid Kawasan Permukiman Idris Jusuf dalam pembukaannya "Rapat Pleno ini hasil dari identifikasi dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Provinsi yang nantinya akan masuk ke dalam TA Kumuh masing-masing Kabupaten/Kota dan menghasilkan hasil dari Rapat ini" tuturnya. Rapat ini dihadiri oleh

Kabupaten/Kota: Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Lubuhantutu Utara dan Kota Padang Sidempuan.

Tim verifikasi administrasi verifikasi data hasil identifikasi awal, data hasil pemilihan, serta wawancara data spasial

kecamatan dan verifikasi teknis lapangan ke-8 kawasan kumuh yang telah dilaksanakan, pada Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) kawasan perumahan dan permukiman kumuh yaitu Kawasan Mela Delian - Lau Cinta Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat 1 (satu) kawasan perumahan dan permukiman kumuh yaitu Kawasan Pasar Gunung Tua 1, kawasan Pasar Gunung Tua 2, Kawasan Pasar Gunung Tua 3, Kawasan Pasar Simanba KITA Sibolga terdapat 2 (dua) kawasan perumahan dan permukiman kumuh yaitu kawasan Aek Manis (Kawasan II), Kawasan Aek Manis (Kawasan III), dan Kawasan Pasar Belakang, Kabupaten Pakpak Bharat terdapat 1 (satu) kawasan perumahan dan permukiman kumuh yaitu kawasan kampung Lida dan sekitarnya.



Kota Tebing Tinggi terdapat 12 (dua belas) kawasan perumahan dan permukiman kumuh yaitu Kawasan Perumahan, Kawasan Bagren, Kawasan Lintang, Kawasan Tanjung Marulak Mir, Kawasan Melor Simanba, Kawasan Teluk Karang, Kawasan Berholi, Kawasan Sungai Padang Durian, Kawasan Bandar Laut, Kawasan Bandar Utama, Kawasan Rantau Lahan 1, Kawasan Rantau Lahan 2, Kota Padang Sidempuan terdapat 1 (satu) kawasan perumahan dan permukiman kumuh yaitu kawasan Aek Batang Ayem, Kawasan Et Weil, Kawasan Lapangan / Pjorkling, Kawasan Sumbang Baru, Kawasan Sumbang, Kawasan Lintang, Kawasan Wai V, Kawasan Muta Padang Lubi.

## Dinas PKP Provsu mengadakan Evaluasi Sistem Informasi Serah Terima PSU Perumahan



Brastagi – Kari, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Evaluasi sistem informasi Serah Terima PSU Perumahan serta Sosialisasi sertifikasi Pengembangan Perumahan kelas Menengah, sesuai dengan Permenbagi Nomor 3 Tahun 2020 dan salah satu tujuan KIK dalam melaksanakan Evaluasi Koordinasi Perseberantakan Korupsi dan Menertibkan nilai CPM. Acara dilaksanakan di Gedung Brastagi Hotel & Resort (KARNS, 21/11/22).

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas PKP Provsu MS Syarif

Dalam sambutannya MS Syarif menyampaikan "dengan kehadiran kita bersama disini telah menunjukkan keseriusan kita dalam memenuhi amanah undang-undang dalam mewujudkan

keefektifan masyarakat dalam kepemilikan rumah yang layak dengan Prasarana Sarana dan Utilitas secara umum"

"Untuk itu mari kita bersama-sama melaksanakan tugas yang dipertanyakan kepada kita agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan bisa seperti kita realisasikan dalam pelaksanaannya" tegasnya.

Kemudian Masada Manurung Kabid PSU PKP Provsu menyampaikan mengenai penggunaan aplikasi bisa dibuka di website proses sbb dengan memasukkan user dan password yang sudah disiapkan kepada kabupaten/kota, kemudian kabupaten/kota bisa menginput dengan membuat sbb (laporan data, jumlah data Sarana dan Prasarana, detail sarana dan Prasarana, upload sertifikat Sarana dan Prasarana dan bisa langsung menerima Berita Acara Serah Terima Sarana dan Prasarana.

Acara dilanjutkan dengan pembinaan materi oleh Inspektur Provsu mengenai "Batas hukum penyertaan perumahan ke kab/kota dan Mekanisme serta alur penyertaan perumahan dan pengembang", kemudian dilanjutkan oleh Kamendagri DPRD Sangga Mengenal sertifikasi dan registrasi badan hukum atau badan hukum yang melakukan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah dan Perumahan menengah tugas pokok dan fungsi provsu dan Kabupaten/kota via email terkait pelaksanaan PSU bertepatan No. 30 tahun 2022.



Acara ini di hadiri oleh peserta dari Kota Medan, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuran, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli, Kabupaten Humbang/Makmur, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sibul.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama

## Kepala Dinas PKP Provsu mengikuti Rapat Laporan awal Final business Case (FBC)



Medan - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Rizki Syahriza mengikuti Rapat Pelaksanaan Final Inception Report proyek KPSU Rilisurawa Terintegrasi KIK Sei Mangpei untuk mempersiapkan tahap Laporan awal Final business Case (FBC) di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jl. Jendral Sudirman No. 81 (Selasa, 26 Juli).

Rapat dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dalam pembukaannya Edy Rahmayadi menyampaikan "RTIW Kabi, Simalungun menjadi kunci utama dalam penyelesaian reviu, dukungan infrastruktur dari penanggung jawab proyek kerjasama (TUPK) jalan akses, air minum, drainase, air limbah dan persampahan perlu

penyelesaian melalui CPS Nirkan untuk alokasi anggaran TA 2023" ujarnya.

Edy Rahmayadi juga menambatkan "Perprovsi juga memerlukan dukungan dari pimpinan (BPD Provsu, BPKD), kabanwil KIK BPN, PT, IN, PT, KIK, JTK, U, Tim KPSU, serta Tim Teknis Pengadaan untuk turut membantu penyelesaian proyek untuk Sumatera Utara yang lebih dan bermartabat" tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh Direktur PDH Kementerian Keuangan Brahmawati Suljono, Sepati Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Sam Indiyah, Direktur Pelaksanaan Pembinaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembinaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR Karya Sekti Harto Yudo, uita

## Identifikasi Data Demand dan Suplai Perumahan Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat



Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh Sujahra mewakili Sekretaris Daerah membuka acara Identifikasi Data Demand dan Suplai Perumahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Majelis Pokja PPH dan Forum PKP Tahun 2022 yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat di Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPKP) Medan, Jl. Gual No. 3A Medan (Rabu, 27/05).

Dalam pembukaannya, Sujahra menyampaikan "Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melibatkan peran multi sektor, serta memerlukan kerjasama institusi

terkait, meliputi perencanaan, kebijakan, perencanaan, basis data, pendayasaan dan sistem pembiayaan. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah program-program strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara" katanya.

Ach Sujahra juga menambahkan, untuk itu, manfaatkan semua sumber daya, mengoptimalkan, meningkatkan inovasi-inovasi baru, melaksanakan serta mendiskusikan target dan rencana kerja sesuai SPP bidang perumahan dan kawasan permukiman, agar dapat memberi pengaruh besar dalam terbentuknya kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang ppp, guna mengatasi berbagai isu dan permasalahan yang mendasar, khususnya dalam menuntaskan backlog, menyediakan hunian yang sehat dan layak, serta mendertasikan "akumulasi" masalahnya.



Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Direktur

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Rakyat Gajahanta, Sub Koordinator Pengelolaan Data Di: SPP PPH, Pjs. Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Perumahan Rakyat, Kepala BPPW Provinsi, Naraumber, Kepala Satuan Kerja Penyelenggaraan Perumahan Provinsi, Pokja PPH Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Asesor Pengembangan (utb)

## Dinas PKP mengadakan Rapat Kerja Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadakan Rapat Kerja Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara. Acara dilaksanakan di Aula Lt. II Kantor Dinas PKP Provinsi di R.H. Kasaulan No. 20 Medan (08/08).

Pembukaan acara dilakukan oleh Kepala Dinas Ari Syahida "urusan perumahan dan kawasan permukiman melibatkan peran multi sektor, kesatuan instrumen yang terkait juga kebijakan dan peraturan dan program-program strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara. Kita perlu bersama-sama berenergi, ujan serta komitmen, dan bersama-sama menangkan

meningkatkan indeks indeks yang pun mengatasi berbagai isu dan permasalahan yang muncul khususnya dalam meningkatkan banklog permukiman rumah tidak layak huni, rumah terdampak bencana" ujarnya.

Kemudian Kabid Kawasan Permukiman Irfan Zulfikar menyampaikan materi mengenai kolaborasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara. "Salah satu permasalahan dalam urusan PKP adalah permukiman kumuh yang merupakan masalah kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Diperlukan komitmen upaya penanganan kumuh melalui penyelenggaraan Pokja PKP di Daerah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan regulasi, kebijakan serta program antar sektor serta memfasilitasi Forum PKP untuk mendorong kolaborasi pelaksanaan kumuh dan belum terwujudnya kolaborasi antar stakeholder dalam memperoleh keseimbangan di seluruh Kabupaten kota serta belum maksimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan".



Acara diikuti oleh: Biro Hukum SetdaProvusi, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provusi, KTR/BPN Provusi, Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan Sumatera Utara II, Balai Perencana Perumahan Wilayah Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provusi, Bappeda Provusi, Dinas Kesehatan Provusi, Dinas Lingkungan Hidup Provusi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provusi, Badan Perencanaan Masyarakat dan Desa Provusi, Dinas Perumahan Mudad dan Pelayanan Perumahan Terpadu Satu Huta Provusi, Kadan Husat Otomotif Provusi Lufia.

## Rapat Pleno Dinas PKP Provsu dengan Kabupaten Nias Selatan



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi mengadakan Rapat Pleno antara Tim verifikasi Pemilihan Percepatan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan. Rapat dilaksanakan di Aula 11.2 Dinas PMP Provinsi (Selasa, 23/08).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PMP Muhammad Haidut "Rapat Pleno ini hadir dari identifikasi dan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis Provinsi yang nanti masuk ke dalam SK Kumuh Kota Nias Selatan dan menindaklanjuti hasil dari rapat ini" ujarnya. Rapat ini dihadiri oleh Kabupaten Nias Selatan.

Dari hasil verifikasi administrasi verifikasi data hasil identifikasi awal, data hasil perhitungan, serta kesimpulan tim spesialis

kawasan dan verifikasi teknis lapangan lokasi kawasan kumuh yang telah dibuktikan pada Kabupaten Nias Selatan terdapat 2 (dua) kawasan perumahan dan permukiman kumuh yaitu di Kawasan Kabahe di lokasi Desa Mianza Kec. Teluk Dalam dengan luas 21,25 Ha dan Kawasan Milmarhe di lokasi Kec. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam dengan luas 14,07 Ha.

Hasil dari Rapat Pleno Kabupaten Nias Selatan mendukung penuh pelaksanaan di Kawasan kumuh dan menyediakan Realibilitas Kerja yang diperlukan. Kamtibmas Pemukiman Kabupaten Nias Selatan akan segera menindaklanjuti dengan menetapkan SK Kumuh oleh Kepala Daerah, dan untuk kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni RTK 2022 akan mendukung luasan dari hasil verifikasi Rapat Pleno ini. (luta)



## Ayo Membaca!



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengikuti Gerakan Sumut Membaca Bersuara dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No 043/2022 tanggal 5 September 2022, akan dilaksanakan Gerakan Sumut Membaca pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, pukul 09.00 – 09.35 WIB.

Gerakan ini diikuti oleh seluruh ASN dan non ASN yang ada di Dinas PMP Provinsi yang dilakukan di ruangan masing-masing. Gerakan Sumut Membaca bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Gerakan Membaca demi kemajuan provinsi Sumatera Utara.

## RAPAT SOSIALISASI APLIKASI SIRTU ( SISTEM INFORMASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI )



Medan – Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan Sosialisasi Aplikasi Sirtu (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni), acara ini dilaksanakan melalui Video Conference via Zoom di kantor Kepala Dinas PPH Provinsi, Jl. A.H. Nasution No. 29 (Jumat, 20/01)

Acara dibuka oleh Kepala Dinas PPH Provinsi Bapak Aji Syahidza "saya akan memperkenalkan aplikasi SIRTU (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni) aplikasi ini akan diimplementasikan untuk seluruh wilayah di Kabupaten/kota untuk kegiatan tahun 2023 dan pada saat ini kami akan memberikan informasi kepada bapak/ibu dalam menggunakan cara penerimaan manfaat

dan dilaksanakan dan dilakukan pada aplikasi SIRTU" ujarnya.

"Kerinci bapak/ibu akan mendapat manual book dan penggunaan dari aplikasi ini dan mulai dari hari ini semua Kabupaten/kota sedang dalam proses keadilan rumahnya, dan secara beres kita menerima undangan dan kami berangkat bahwa dalam pengusulannya sudah mengikuti kriteria bahwa yang diusakan masuk dalam definisi keadaan rumah dan permasalahan rumah yang ada pada SK Kawasan rumah Kabupaten/kota dan nantinya ulas akan diintegrasikan pada keadilan rumah. Dan sebagai ini memudahkan kita dalam melakukan pendataan calon penerima rumah rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni" tuturnya.

Ketua Bimbingan teknis Rumah Swadaya menambahkan "bahwa kedepannya kami menerima usulan By Name By Address dan Kab/kota untuk menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni akan melalui aplikasi SIRTU dan tidak ada lagi pengisian berkas secara manual. Dan jika sudah bisa diinput website "Takun Anggapan Binaan" tambanya.

Adapun SIRTU ini dapat diakses melalui [www.pemprovsumut.com](http://www.pemprovsumut.com) pilih user SIRTU. Kemudian dapat masuk dengan user dan password yang telah diberikan kepada Kabupaten/kota, lalu klik menu dashboard, pada menu ini kita bisa melihat 10 jumlah data yang sudah di input dan kabupaten/kota untuk melakukan menginput data baru klik menu data pilih pendaftaran RTU kemudian pilih tambah data, lalu di semua kolom sesuai dengan data peserta, jika sudah selesai pilih simpan. kemudian pilih klik lalu upload dokumen untuk melakukan penginputan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP KK dan file pendukung lainnya yang diminta pada halaman website. Setelah input dan upload data selesai maka pihak kabupaten/kota menulangi verifikasi dari tim Provinsi. jika admin kabupaten/kota ingin melihat formulir peserta pilih klik cetak.

Selanjutnya untuk melakukan penginputan kelompok masyarakat masuk ke menu data lalu pilih kelompok masyarakat kemudian pilih tambah data peserta lalu isi formulir data peserta kemudian jika sudah selesai pilih simpan. Setelah berhasil di simpan, pilih aksi lalu pilih anggota, kemudian klik cari data peserta. Mengupload dokumen pokmas yangnya tamba seperti penginputan dokumen peserta RTU/ LHA



## Gerakan menanam tanaman pangan di pekarangan secara bersama-sama dapat meringankan krisis pangan



rapit. Gerakan menanam tanaman pangan di pekarangan secara bersama-sama dapat meringankan krisis pangan yang dihadapi akan terjadi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi - Simas Kabupaten Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang menyarankan seluruh ASN di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk menanam cabai merah dan cabai rawit. Sekretaris Dinas PMP Provinsi, Muhammad Haidar melakukan serah terima bibit cabai merah dan cabai rawit dalam polybag guna memenuhi kebutuhan para ASN guna berpartisipasi kemungkinan krisis pangan (Simas, 19/09).

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi juga memerintahkan kepada kaizen II, para asisten, staf ahli dan juga Sekda. Seluruh ASN di rumahnya harus ada polybag-polybag minimal 10 buah, untuk menanam cabai merah dan cabai

## Rapat Koordinasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadakan Rapat Koordinasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota di Hotel Sibajak Internasional Bontotagi di Mandala (19/09) Bontotagi Kabupaten Kampi. (Kampis, 22/09). Kepala Dinas dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Muhammad Haidar pada acara pembukaan menyampaikan laporan atas kehadiran para peserta dan berharap dari hasil ini semua unit yang hadir dapat bersinergi meningkatkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam city unit, rwi, kumuh dan kemiskinan dalam menuntaskan backlog dan mewujudkan hunian yang sehat dan layak



hasil" ujernya. Pada sesi pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumatera Utara dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas SDA-COYT Provinsi. Disampaikan pada sesi kedua penyempaan paparan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas PMP Provinsi.

## Rembuk Warga II



Delit Serdang (27/05/2022). - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pesisir mengadakan Rembuk Warga II dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Dengan Luasan 10-15 Ha TA 2022 di Desa Rantau Panjang Kec. Pantai Lahu Kabupaten Deli Serdang.

Acara ini dihadiri oleh warga desa penerima manfaat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, tim teknis Kabupaten, Tim Teknis Provinsi Sumatera Utara, dan MK, TPL Kabupaten Deli Serdang. Acara dibuka oleh salah satu perwakilan dari tim penyelenggara Desa Rantau Panjang.

Kepala Dinas PKP Provinsi mewakili Kepala Bidang Rumah Swadaya Madaya Makurung, menjelaskan mekanisme pelaksanaan kegiatan mulai dari pengembalian borang, pembayaran ke penerima bahan dan dilampirkan dengan aksi tanpa jekot kepada penerima manfaat. Selanjutnya Madaya Makurung meminta kepada penerima manfaat agar membuka tabungan Bank Sumut untuk mempermudah proses pembayaran upah gaji kerja.



## Kadis PKP mendampingi Gubsu tinjau lokasi gempa bumi



Tapanuli Utara – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi RI Supriatna mendampingi Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi meninjau lokasi pasca peristiwa gempa bumi di Tarutung, kab. Tapanuli Utara (Senin, 31 Oktober 2022).

Gempa dengan kekuatan Magnitudo 6,2 di kejauhan di Tapanuli Utara pada Sabtu (01/10) dini hari, meretas 1279 unit rumah, 72 tempat ibadah, 30 titik ruas jalan, 29 unit kantor pemerintahan, tiga unit kantor swasta, dan 25 titik satuan usaha yang rusak akibat gempa.

Dalam kunjungannya Eddy Rahmayadi menyampaikan: "Sumatera merupakan hal yang prioritas untuk warga."

Memorandum Prokesi bersama Forkopimda akan segera memperbaiki rumah dan tempat ibadah.

Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi meninjau lokasi yang terdampak bencana gempa bumi di...



## Dinas Perkim Sumut menyelenggarakan Rembuk Warga II dalam rangka Kegiatan Perbaikan RTLH di Nisel



Rembuk

Desa Selesai - (Desa 04 Oktober 2022) Rembuk Warga II di Kabupaten Niseland merupakan salah satu tahapan dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tatak Layak Huni (RTLH) yang diselenggarakan Dinas Perkim Provinsi di Kantor Camat Teuk Dalam dihadiri oleh kurang lebih 40 orang terdiri dari unsur Camat, Sekcam, Lurah, Dinas Tarukim Kab. Nisel, Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik dan Pemberdayaan, Konsultan Manajemen Konstruksi Proses, Tim RTLH Provinsi, warga penerima manfaat dan penyedia

Acara diawali dengan kata sambutan dari Camat Teuk Dalam Bapak Marlin Wau, S.E. , kemudian dilanjutkan kabid Rumah Swadaya Dinas Perkim Provinsi Ibu Helisa Manurung S.T. melalui zoom menyampaikan komitmen dan tujuan pelaksanaan kegiatan. Untuk tahapan kegiatan dilakukan di tempat yang berbeda dihadiri oleh Pejabat Pengadaan, Ketua Pokmas dan Penyedia Material

Terdapat 50 Lahan Penerima Manfaat di Kecamatan Teuk Dalam yang tersebar di Desa Baboho dan Mominawe. Seluruh CIM antusias mendengarkan penjelasan dalam dialog interaktif dimana masyarakat dan Kabid Rumah Swadaya saling bertanya untuk mendapatkan informasi yang jelas

Ruf memberikan penjelasan dan Dinas Perkim Kab Nisel yaitu Bapak Yandima Mardiana, S.T. serta Konsultan Manajemen Konstruksi

menunjukkan secara Teknis pertakikan RTLH ini dan awal sampai dengan selesai.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Komak Ponglong, Peta Integritas dan Naskah Perjanjian Bersama Sosial (Naskah



## Rapat Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Tapanuli Tengah



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi melakukan Verifikasi SK Kumuh kabupaten Tapanuli Tengah. Proses Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi sesuai dengan kewenangan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PW/2021 tentang Pencapaian dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat 12, 0 Dinas PUP Provinsi, Jl. A.H. Nasution No. 20 Medan, 05/10/2022.

Acara dibuka Kepala Dinas PUP Provinsi diwakili oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman Medan Zulhikar. Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh

Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan hasil dan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten Tapanuli Tengah. Kawasan kumuh dengan luasan 30-13 Ha terdiri:

kawasan permukiman terdapat pada 7 kawasan yang ditunjukkan yaitu Kawasan Bukit Patawangin, Kawasan Hajarin, Kawasan Lubuk Tukuk Bana, Kawasan Mela, Kawasan Pasar Terendam, Kawasan Patah Bidang dan Kawasan PO Manduhmas. Dari kawasan yang diajukan masih perlu melakukan koreksi data lingkungan atau data dalam rumah yang diajukan. Kawasan PO Manduhmas perlu melakukan delimitasi ulang karena jalan arteri masuk ditatapannya dan akan disampaikan kepada Tim verifikasi Provinsi kembali selambat-lambatnya 11 Oktober 2022.

Kabupaten Tapanuli Tengah sudah memiliki RTRW No. 16/2019, namun belum

memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lokasi yang masuk dalam poligon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW kabupaten Tapanuli Tengah.



## Rapat Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Nias Utara



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi melakukan verifikasi SK Kumuh Kabupaten Nias Utara. Proses verifikasi dilakukan Tim verifikasi sesuai dengan Kemungkinan Penurunan Kinerja Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PM/2022 tentang Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas KP Provinsi di J.H Nasution No. 21 (Rabu, 15/10/2022).

Kepala Dinas diwakili oleh Kepala Bidang Kawasan Perumahan Irfan Zulfikar membuka acara, dan menyampaikan "Verifikasi pendataan kelengkapan readiness criteria SK Kumuh bertujuan agar pendataan kawasan permukiman

kumuh sesuai dengan data yang ada di lapangan dan sesuai dengan RTW yang sudah ada, dan untuk mempermudah tugas bendahara ini supaya tidak memisalkan yang bukan kawasan permukiman sebagai kawasan kumuh untuk mencapai luasan 10 - 15 Ha yang merupakan kewenangan Provinsi" ujarnya.



Kemudian Tim verifikasi SK kumuh kabupaten Nias Utara menyampaikan hasil identifikasi dan kelengkapan data kawasan kumuh kabupaten Nias Utara. Kawasan kumuh dengan luasan 10,15 Ha sesuai kewenangan provinsi ada 1 kawasan yaitu Kawasan Pagar Lahewa dan Lukan yang masuk dalam program pemukiman kelas perumahan dan permukiman sesuai dengan persyaratan pada ruang dalam RTW kabupaten Nias Utara.

Dari hasil verifikasi kabupaten Nias Utara sudah memiliki RTW No. 1 Tahun 2015, Kab. Nias Utara belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten Nias Utara memiliki RDTR dan masih dalam tahap penyusunan Peta yang akan dimasukkan ke Provinsi paling lambat tanggal 15 Oktober 2022 juga.

## Dinas Perkim Sumut menyelenggarakan Rembuk Warga Kedua dalam rangka Kegiatan Perbaikan RTLH di Kota Tanjung Balai



(Kamis, 14 Desember 2022) Rembuk Warga kedua yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tebuk Sibung ini merupakan salah satu tahapan dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Tanjung Balai. Acara dihadiri langsung oleh Walikota Tanjung Balai Bapak H. Wati Thabib, S. Ag, MM yang ikut memberikan sambutan, beserta jajaran yaitu dari unsur Camat Tebuk Sibung Bapak H. Ali, S.S., M.AP, Camat Sei Tuanang Raya Bapak Gando Tuah Karo-karo, S.H., W.AP, ST, Kadis Perkim Kota

Tanjung Balai Bapak Taji Adrar, S.T. beserta jajaran, serta 22 (dua puluh dua) Calon Penerima Manfaat dan Pengusaha Tanggung sebagai penyedia bahan material yang telah ditunjuk.

Sambutan dan Kepala Dinas Perkim Sumut disampaikan oleh Kepala Bidang Rumah Swadaya Ibu Madasa Ramurung, S.T, beliau menyampaikan komitmen dan tekad pelaksanaan Perbaikan.

Terdapat Calon Penerima Manfaat yang terdaftar di Kecamatan Tebuk Sibung dan kec. Sei Tuanang Raya. Seluruh LPM yang hadir antusias mendengarkan penjelasan dalam dialog interaktif dimana masyarakat Walikota Tanjung Balai serta Kabid Rumah Swadaya saling bertanya untuk mendapatkan informasi yang jelas.



Acara diakhiri dengan penandatanganan kontrak. Peningkat, Perta Integritas dan Tuakan Penerimaan Bantuan Sosial (muda)

## Kadis Perkim mendampingi Komisi D DPRD Ke Provinsi Jawa Tengah



Jawa Tengah - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mendampingi Komisi D DPRD Provinsi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah A. Madukoro Taswanjemas, Jawa Tengah.

Kunjungan kerja disambut oleh Ariel Sjatmiko Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didampingi eselon II dan eselon III. Dalam pertemuan tersebut salah satu tokoh anggota

komisi D DPRD Provinsi menanyakan "jumlah titik kawasan permukiman kumuh yang ada di provinsi Jawa Tengah". Gelar Moh Nador Kasi Fasilitas Pengadaan Tanah menjelaskan "ada 518 titik kawasan kumuh yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian 224 titik kawasan kumuh dengan luasan <math>< 10\text{ Ha}</math> yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota, 133 titik kawasan kumuh dengan luasan 10-25 Ha yang merupakan kewenangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 161 titik kawasan kumuh dengan luasan > 25 Ha yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat" jelasnya.

SelanjutnyaERRY Hananto Sirodang ketua Komisi D DPRD Provinsi bertanya mengenai "program Pemerintah Pusat yang ada di Dinas PTKP Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menata kawasan kumuh di Prov Jateng". Sri Wiharsanto Kabid Perumahan menjawab "kabupaten/kota mengajukan permohonan vertikal vertikal dilakukan sesuai proses, termasuk format harus sesuai dengan desain. apabila sudah sesuai dilakukan rapat vertikal sesuai dengan kewenangan luasan kumuh apabila di Kabupaten/kota atau Provinsi" jelasnya.

Kemudian rombongan Pemprovu melakukan kunjungan ke Sub Rejo dan Desa Dempel Rejo Kabupaten Kendal, Jawa Tengah untuk melihat lokasi rumah yang sudah mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).  
JUMI



## Rapat Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Toba



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi melakukan verifikasi SK kumuh Kabupaten Toba. Proses verifikasi dilakukan oleh Tim verifikasi dengan kewenangan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 14/RTM/2014 tentang Penetapan dan Peningkatan Kualitas Wilayah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas PWP Provinsi di Jalan Nasution No. 29 Medan, 04/10/2022.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas PWP Provinsi dan diarahkan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Zonasi kemudian Tim Verifikasi SK kumuh Kabupaten Toba menyampaikan hasil dan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten

Toba. Kawasan kumuh dengan jumlah 10-25 Ha sesuai kewenangan provinsi terdapat pada 3 kawasan yang ditunjuk yaitu kawasan Hala Pinna, Kawasan Pasar Lagudis dan Kawasan Pansoburan Tengah. Dan kawasan yang ditunjuk masih perlu melakukan koneksi data numerik serta profil kawasan kumuh, dan akan disampaikan kepada Tim Verifikasi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2022.

Kabupaten Toba sudah memiliki RTWV No. 12 tahun 2017, yang sebelum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lokasi yang masuk dalam zonasi merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peraturan otonomi daerah dalam RTWV Kabupaten Toba yaitu



## Rapat Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2022 serta Penyiapan Program Ditjen Perumahan TA 2023 di Wilayah I (Pulau Sumatera dan Kalimantan) Kementerian PUPR



Medan - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi AB Syahza menghadiri dan menyampaikan kata sambutan pada Rapat Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2022 serta Penyiapan Program Direktorat Jenderal Perumahan TA 2023. Rapat dilaksanakan di Hotel Santika Premier Dyandra Hotel Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan Rabu, 12 Oktober 2022.

Dalam sambutannya Kepala Perkim Sumut AB Syahza menyampaikan "pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hal ini tercermin dalam misi pertama RKMD Provinsi

satu misi adalah masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Tantangan pembangunan saat ini bisa kita hadapi dengan memperpendekkan kepastian, energi pembangunan serta mengoptimalkan tugas masing-masing antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota" katanya.

"pada kesempatan yang baik ini, diingatkan kesediaan semua pihak untuk selalu berkoordinasi dan membuat sinergis strategi perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 agar lebih efektif dan efisien. Tanpa kolaborasi yang baik, upaya kita dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat tentu akan terhambat"

Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi panel diskusi dan sesi doa. Rapat berlangsung mulai dari Rabu 12 Oktober sampai dengan Jumat 14 Oktober 2022.



Oktober 13, 2022 08:00 WIB

## Rapat Internal Finalisasi RP3KP Tahun 2022 – 2024



Medan, Kamis, 13 Oktober 2022 – Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinkas) Sumut, S.T. M. Eng. SC dalam pembukaannya kado menyampaikan "Dinas bekerja untuk membantu masyarakat, khususnya Masyarakat Berperifatan Rendah (MBR). Semua personil dinas adalah satu tim yang memiliki persepsi atau pandangan yang sama agar bekerja dengan akal dan hati nurani untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Buku Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2022 – 2024 merupakan acuan operasional bagi seluruh perangkatlu kepentingan di bidang pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman. Adanya RP3KP dapat mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mendukung penyelesaian perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional" ujarnya.

"RP3KP akan mengkonkretkan isu dan permasalahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman salah satunya

adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sesuai dengan visi misi subsektor menjadikan Sumut Kermahabbat yang masyarakatnya tinggal di rumah yang layak huni. RP3KP ini juga mendukung tugas-tugas lain pada Dinas Perkim Provinsi yaitu penyediaan perumahan untuk korban bencana. Selanjutnya saya berharap kita semua berperan aktif dalam penyempurnaan rancangan pada dokumen dan file yang memiliki akses serta berkoreksi. Dalam rangka pengabdian sukarela" tambahnya.

Rapat Finalisasi Buku RP3KP dihadiri oleh pejabat struktural, pejabat fungsional dan jh. perencana pada Dinas Perkim Sumut.



Oktober 17, 2022 08:00 WIB

## DINAS PERKIM MENGAJAK BAZNAS BERKOLABORASI MENGURANGI RTLH

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Rumah Sakinah Medan Estate Kabupaten Deli Serdang Jumat (14 Oktober 2022).

Kunjungan tersebut diterima oleh Prof. Dr. H. Mohammad Hatta selaku Ketua BAZNAS Provinsi yang didampingi oleh Azmi Wansyah.

Kadis Perkim Sumut, ARI Sjahriat, S.T. M. Eng. SC, yang didampingi Samudra Elnor

S.E. selaku Koordinator Tim Teknis Kegiatan Perbaikan RTLH Tahun Anggaran 2022 mengutarakan maksud kedatangannya adalah mengajak BAZNAS Sumut untuk bersama-sama melaksanakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selanjutnya Ketua BAZNAS Sumut juga menyampaikan bahwa BAZNAS Pusat akan memberikan bantuan perbaikan RTLH di Sumatera Utara melalui BAZNAS Sumut sebanyak 10 unit rumah dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 25.000.000,- untuk masing-masing.

Takhir kunjungan tersebut Kadis Perkim Sumut dan Ketua BAZNAS Sumut sepakat untuk melakukan kerjasama dengan membuat MoU (Samudra E).



October 28, 2022 9:00 AM WIB

## KEPALA DINAS PERKIM PROVSU MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PERBAIKAN RTLH



Semarang Utara - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara (A.R. Spahyza, S.T., M. Eng. Sc. didampingi oleh para pejabat fungsional : M. Emiliyah Intya, ST, Julid, ST dan Ruli Andriyah, ST

melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat (18/10).

Tiba di lapangan Kepala Dinas Perkim disambut oleh Konsultan Manajemen Kemitraan (MK) dan para Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kabupaten. Kadis Perkim bertemu dan berdiskusi dengan Penanata Masyarakat dan Penyuplai bahan material (Pangjono) yang ditunjuk. Selanjutnya melihat proses rumah yang sedang di rehab.

Setelah Monev di Kabupaten Karo, Kadis melanjutkan perjalanan Monev ke Kabupaten Pakpak Bharat dan disambut oleh Tim Kadis Perkim & LH Kab. Pakpak Bharat, Haringan Barrit, ST, ST.

Kegiatan Monev di Kabupaten Pakpak Bharat di akhiri

dengan foto bersama.





## Rapat Fasilitasi Pengadaan Lahan Relokasi Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh



Medan - Dinas Perkim Sumut melakukan Rapat Fasilitasi Pengadaan Lahan Relokasi / Permukiman Kembali (pdk) Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh di Mel. Sei Belah Kabupaten Langkat. Rapat diadakan di ruang rapat No. 23 Dinas Perkim Sumut (Jumat, 21 Oktober 2022).

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perkim Sumut, H. Aji Syahza, ST, M.Eng. Sc dan menyampaikan "Pengadaan Lahan Relokasi atau Permukiman Kembali yang berada di atas lahan PT, AU ini masuk ke dalam kegiatan Strategi Daerah Pembangunan Role Model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sei Belah Langkat. Dibarengkan selesah

relokasi tidak ada pemukiman baru yang terjadi di masyarakat" ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Sumut Irhas Zulfhan mengenai Pembangunan Role Model Pengurangan Luas kawasan Kumuh Terintegrasi dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sei Belah kab. Langkat rufri.



## Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Dinas Perkim Sumut Bulan Oktober 2022 melakukan Diskusi 8 Kecerdasan dan Bakat Anak.



Kepala Dinas Perkim Sumut N. AIS Suaniza, S.T, M. Eng.Sc., memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan/pertemuan rutin bulanan Dharma Wanita Persatuan Dinas Perkim Sumut didampingi Kabid Rumah Umum, Kabid Rumah Swadaya di Aula Dinas di A.M. Rasudin No. 20 (Senin, 24 Oktober 2022). Setelah pembuka Kepala Dinas mengarahkan para Ibu-ASI di Dinas Perkim Provinsi untuk berkolaborasi aktif dalam DWP Dinas Perkim Sumut, sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya dalam sambutan dan laporannya Ketua DWP Dinas Perkim Sumut Ibu Etni Dedy-Ekholia AIS Suaniza telah menyampaikan terkait kehadiran anggota (Ibu-ASI).

belum mencapai 100%. Partisipasi aktif seluruh anggota sangat diperlukan untuk kemajuan organisasi Dharma Wanita Persatuan Dinas Perkim Sumut.

Pada acara tersebut menghadirkan Psikolog dan rekan Tirta Pando, Pencinta Seni Ralmah Juludi, S.Pd. Dalam kesempatannya ini psikolog yang akrab di panggil Ibu Umi Mengangkat Topik 8 Mengenai Kecerdasan dan Bakat Anak. Kemudian ketua DWP Perkim Sumut mengharpikan kepada Ibu-Ibu anggota bahwa Ibu dapat melihat perkembangan kecerdasan dan bakat yang ada pada anak.

Acara dilanjutkan dengan dasar dan dukungannya dengan foto bersama (sbb):



## Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Meninjau Kondisi Faktual Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Perkim Sumut



Berdas – Komisi Informasi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perkim Sumut, tujuan utama adalah untuk melihat kondisi faktual keterbukaan informasi publik pada Dinas Perkim Sumut pelaksanaan Tim ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Dr. Abdul Murtis, SE, M. Si didampingi Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Dedy Andaryah, S. Sos, Ketua Divisi Kewaspadaan Dr. Lut Adna Nurafiah, M. A, dan Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Muhammad Saffi Sihorus, SE. Selasa (25/10),

Tim meninjau langsung Ruang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (RPIID) yang ruang kerja Dinas. Tim memberikan apresiasi atas ketersediaan RPIID dan Ruang

Anggota Dinas sekaligus memberikan arahan pertaikan dan penyempurnaan untuk peningkatan mutu pelayanan informasi publik Dinas ke depannya.

Tim diterima oleh anggota Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Pembantu Dinas Perkim Sumut yaitu Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Komplain (Korver) dan Dokumentasi Des. Beside Sahmawati, M. Si, Pejabat Pembantu dan Pembuat Berita Nanda Rahmaza, S. Kom, dan Agustinawan Simed.

Rujukan Kerja di Akhir (berikan Foto Bersama) (25/10)



## Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nedra, Rabu, 26 Oktober 2022 – Tim verifikasi SK Kumuh Kabupaten Simalungun menyampaikan hasil dan kelengkapan data kawasan Kumuh Kabupaten Simalungun. Kawasan Kumuh terdapat pada 7 kawasan yaitu Kawasan Dook Hatahan, Kawasan Permatang Simalungun, Kawasan Siantar-Estere, Kawasan Hekotian Hekotangan, Kawasan Sei-Rangin, Kawasan Bandar Selamat, Kawasan Perbatasan Lendu Dama. Dan kawasan yang dibuktikan masih perlu melakukan konfirmasi data numerik serta profil kawasan kumuh, dan akan disampaikan kepada Tim verifikasi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 7 November 2022.

Kabupaten Simalungun sudah memiliki RTRW No. 33 Tahun 2022, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sedang dalam penyusunan dan Lokasi yang masuk dalam zonasi merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam



RTRW Kabupaten Simalungun.



Selanjutnya Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan hasil dan kelengkapan data kawasan Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kawasan Kumuh terdapat pada 9 kawasan yaitu Kawasan Padang Sibin, Kawasan SIA, Kawasan Sumber Sari, Kawasan Perumahan Bangun Jaya, Kawasan Cikampak IA, Kawasan Cikampak IB, Kawasan Simpang XI, Kawasan Aek Batu Utara Cinta Makmur dan Kawasan Alam Dewa. Dan kawasan yang dibuktikan masih perlu melakukan konfirmasi data numerik serta profil kawasan kumuh, dan akan disampaikan kepada Tim verifikasi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 7 November 2022.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah memiliki RTRW No. 4 Tahun 2011, namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lokasi yang masuk dalam zonasi merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu:

RTRW No. 4 Tahun 2011, namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lokasi yang masuk dalam zonasi merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu:

## MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN PERBAIKAN RTLH DI 7 KAB/KOTA MEMBERIKAN ENERGI POSITIF TERHADAP KELANCARAN SERTA PROGRES KEGIATAN



Sumatera Utara - Kabupaten Langkat dan Deli Serdang merupakan Kab/Kota yang pertama dikunjungi oleh Bapak U. Ali Syahida, S.T, Jt. Eng. Sc. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbaikan RTLH ini dilaksanakan pada 7 Kab/Kota yaitu Kab. Langkat, Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Kab. Labuhanbatu, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidimpan. Kegiatan Monitoring ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Bapak melihat langsung Progres Pekerjaan Perbaikan RTLH tersebut. Setelah dari Desa Perti Kab. Langkat dan Desa Rantau Panjang Kec. Pertiak Labu Kab. Deli Serdang Kepala Dinas Perkim Sumut dan jajaran Pejabat Fungsional Dinas Perkim Sumut menuju Kota Tebing Tinggi, berikutnya dilanjutkan ke Kota Tanjung Balai, di Kota Tanjung Balai, disambut oleh Kepala Dinas Perkim Kota Tanjung Balai pak Tanjung Abrar, S.T dan Tim TFL diikuti Keluaran Pjwal Baru, Kecamatan Sei Tuanang Kecamatan U. Kepala Dinas Perkim Sumut berkomunikasi dengan masyarakat yang menerima manfaat dan sekaligus meninjau ke penyedia bahan bangunan. Pangkajene selain dengan penyisiran bahan material ke Rencema Manfaat, berjalan dengan baik. Berangkat dari Kota Tanjung Balai Kepala Dinas Perkim Sumut dan Tim selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kab.

Labuhanbatu, disambut di Kab. Labuhanbatu Kepala Dinas Perkim Sumut, disambut dan didampingi oleh Kepala Perumahan Dinas Perkim Labuhanbatu, serta Tim TFL, terkait Pelaksanaan Pembangunan RTLH Tahun Anggaran 2022. Setelah selesai di Kab. Labuhanbatu, Kepala Dinas Perkim Sumut dan jajaran Pejabat Fungsional Dinas Perkim Sumut melakukan monitoring ke Kota Padang Lawas Utara yang didampingi Kepala Bidang dan Tim Teknis Dinas Perkim Padang Lawas Utara beserta Tim TFL terkait Pelaksanaan Perbaikan RTLH. Kota Padang Sidimpan merupakan kota terakhir yang dikunjungi Kepala Dinas Perkim Sumut dan 7 Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbaikan RTLH. Kepala Dinas Perkim Sumut berharap dengan kunjungan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Perbaikan RTLH serta menemukan seluruh kendala-kendala yang terjadi di lapangan sehingga dapat menemukan solusi atas pemecahan masalah pada tiap Kab/Kota, agar kegiatan ini bisa tepat waktu sesuai dengan rencana. (janda)



## Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Samosir



Medan - Dinas Perkim Sumut menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Samosir, (Jumat, 26/10).

Kunjungan kerja Komisi III DPRD kabupaten Samosir di sambut oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. KH. Syaifula S.T, M. Eng, Sr. didampingi oleh Kabid Rumah Sederajat (RS) melalui Zoen, Jefung Iku Kurniasih dan Umar Juni. Pada kesempatan tersebut anggota DPRD Kab. Samosir Jimmy Septia menyampaikan "Insyaallah Kabupaten Samosir bisa mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena masih banyak perumahan dan permukiman yang kumuh"

selanjutnya, kemudian Julimen menyatakan anggota DPRD Kab. Samosir menambahkan "Samosir merupakan negeri indah kegiatan surge masuk ke dalam kawasan strategis daerah dan sudah mulai membangun pariwisata dari desa-desa yang ada di Kab. Samosir, kami juga membutuhkan bantuan ISU dari pemerintahan Provinsi" tambahnya.

Kabid Rumah Sederajat Hedisa Manurung menyampaikan "Untuk Kabupaten Samosir di rencanakan mendapat bantuan Rehabilitasi RTLH pada TA 2025 sebanyak 20 unit rumah. Untuk mendapatkan bantuan Kabupaten Samosir perlu mempersiapkan SK Asumut dan di verifikasi ke Pangrehmas tahun ini agar tahun 2022 tidak perlu melakukan verifikasi lagi agar mendapatkan pengerjaan bantuan" ujarnya. Hedisa juga menambahkan "Bantuan pemerintah provinsi bisa memberikan bantuan ISU jika bantuan yang diberikan masih berhubungan dengan perumahan permukiman, jadi bantuan yang bisa diberikan seperti jalan paving blok yang berada di dalam perbatasan kabupaten kota" jelasnya juga.



Kabupaten 40/2024/00000/00000

## PEMBINAAN MENTAL



Setiap hari Kamis Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan Pengajian untuk meningkatkan kesadaran bergama dalam aspek keimanan dan pengetahuan, sehingga ASN di lingkungan Dinas Perumahan Provinsi memiliki kepribadian yang sehat, aktif yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. (Samud E)



<http://dispkp.sumutprov.go.id/updated/category/berita-kegiatan/>

Dokumentasi Konten di Instagram

Cancel

Edit info

Done



↳ disperkimsumut

Pentingnya Personil Tangguh menghadapi Bencana yang datang !!!!

Kepala Bidang Rumah Umum Zubir didampingi Pejabat Fungsional Bidang Rumah Umum Johatan Tobing dan Staf Bidang Rumah Umum Torang



Add location

Accessibility

Cancel

Edit info

Done



↳ disperkimsumut

Kasih mu tak terbatas..!!!!  
Untuk semua ibu terbaik, Selamat Hari Ibu. Ibu berhak mendapatkan cinta, perhatian, dan dukungan.

Sohib perkim ....yuk di tag ke ibu kamu!



Add location

Accessibility



Perempuan Berkarya Indonesia Maju



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Demokrasi Di Lantai 1

News Bojeng Tumor Untuk Cuci di Bandung, Torang Buntung dan Bawang Tumor Untuk  
Mangrove. Apa Pembinaan Di Lantai Gedung Penanggulangan Bencana akan membuat  
berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 14 s.d. 15 Desember 2022 di Aula Kantor DPRD Provinsi  
Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, mari simak selengkapnya melalui video di bawah ini. [Lihat selengkapnya](#)



Instagram

See all posts from @dinasperkim

Profil publikasi

Like

Comment

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Ternyata Semen Benger Jenis Sama??

Semen merupakan komponen utama dalam membangun sebuah rumah tinggal. [Lihat selengkapnya](#)



## 9 Jenis-Jenis Semen yang Digunakan untuk Konstruksi Bangunan

Dalam membangun sebuah rumah atau bangunan lainnya, tentunya akan sangat membutuhkan salah satu material yang paling vital yaitu semen dan memiliki Jenis dan Fungsi yang berbeda.



## Apa aja ya?



Profil publikasi

Instagram

See all posts from @niva

Profil publikasi

Like

Comment

### SENAM KEBUGARAN JASMANI

Melakukan olahraga di pagi hari akan membuat tubuh mendapatkan asupan energi yang cukup-kondisi ini akan memudahkan tubuh masuk ke dalam jamung dan juga akan sangat maksimal

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [halaman kami](#) atau [kontak kami](#)



Share your thoughts

Promosikan postingan

10 likes

Disas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara



Disas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara